

Rencana Kerja

(RENJA DESDM)

Penyempurnaan
Rancangan Akhir

2
0
2
6

RENJA | *State Energy and Sustainable Power Plan* [2026]



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B),
Jl. Syech Nawawi Al Bantani - Palima, Telp. (0254) 267109 Fax. 267110

KATA PENGANTAR

Assalamu'alakum Wr. Wb



Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 yang memuat Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan untuk tahapan Penyempurnaan Rancangan Akhir.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023 - 2026 dan juga sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026 ini. Semoga, dokumen ini nantinya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten.

Serang, Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten

ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT
NIP. 19771230 200212 1 008



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ESDM PROVINSI BANTEN TAHUN LALU	10
2.1 Hasil Evaluasi Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	35
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	56
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	71
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	71
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	73
3.3 Program dan Kegiatan	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	85
BAB V PENUTUP	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Banten dan Pencapaian Renstra ESDM Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2025	12
Tabel 2.2.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Dinas ESDM Tahun 2024.....	23
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	25
Tabel 2.4.	Definisi Operasional dan Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Capaian SAKIP OPD	26
Tabel 2.5.	Hasil review Inspektorat Provinsi Banten terhadap Capaian SAKIP OPD Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2024	27
Tabel 2.6.	Data pengukuran IKU Indeks Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024.....	29
Tabel 2.7.	Data pengukuran IKU Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan Tahun 2024	31
Tabel 2.8.	Data pengukuran Rasio Elektrifikasi Provinsi Banten Tahun 2024.....	34
Tabel 2.9.	Uraian teknis kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan.....	38
Tabel 2.10.	Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Banten tahun 2023	44
Tabel 2.11.	Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Banten.....	44
Tabel 2.12.	RTS Terpasang Listrik Perdesaan Tahun 2003-2023 melalui Pendanaan APBD Provinsi Banten	45
Tabel 2.13.	RTS Belum Berlistrik Mandiri dan Rasio Elektrifikasinya per Kabupaten/Kota Tahun 2023	46
Tabel 2.14.	Jumlah REKOMTEK Pengusahaan Ketenagalistrikan (2015-2021).....	48
Tabel 2.15.	Jumlah REKOMTEK Pengusahaan Ketenagalistrikan s.d 2021 per Kabupaten/Kota.....	48
Tabel 2.16.	Data Cekungan Air Tanah Provinsi Banten (Kepres No. 26 Tahun 2011)	50
Tabel 2.17.	Penyediaan Data dan Informasi Aspek Kegeologian	51
Tabel 2.18.	Review Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2026.....	57
Tabel 2.19.	Analisis Review Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2026	64
Tabel 2.20.	Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026.....	66
Tabel 2.21.	Pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten di SIPD-RI untuk RENJA Tahun 2026.....	70
Tabel 3.1.	Prioritas pembangunan Sektor ESDM dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2026.....	72
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran RENJA DESDM Tahun 2026	73
Tabel 3.3.	Program Prioritas pada RENJA DESDM Tahun 2024 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026	75
Tabel 3.4.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	78

Tabel 4.1.	Perbedaan Rumusan Ranwal/Rancangan, Rancangan Akhir dan Rancangan Akhir Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan dari RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026.....	88
Tabel 4.2.	Rumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana dan Pendanaan dari RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1.	Data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2024 (Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM)	33
Gambar 2.2.	Kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan	37
Gambar 2.3.	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Nasional	41
Gambar 2.4.	Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Banten	42
Gambar 2.5.	Rencana pengembangan dan pemanfaatan EBT di Provinsi Banten oleh Pusat	42
Gambar 2.6.	Data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2023 (Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM)	46
Gambar 2.7.	Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Banten	49
Gambar 2.8.	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi bencana alam geologi)	51
Gambar 2.9.	Jejak Tsunami Krakatau 1883 di Kab. Pandeglang, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi geopark)	52
Gambar 2.10.	Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten	52
Gambar 2.11.	Peta Potensi Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten	53
Gambar 2.12.	Potensi Cadangan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten	53
Gambar 2.13.	Pokok Pikiran DPRD untuk RENJA 2026 DESDM	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026
- Lampiran 2 : Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026
- Lampiran 3 : Rumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten (Aplikasi SIPD.GO.ID beserta Rumusannya)

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan tahunan di Perangkat Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) Tahun 2025-2029 yang proses penyusunannya telah menyelesaikan tahap penyempurnaan rancangan akhir.

Dalam rangka melaksanakan amanat perundang-undangan tersebut dan sejalan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam penyiapan perencanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) untuk tahun 2025 serta dengan memperhatikan mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten melaksanakan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 yang didalamnya memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (Pasal 13 ayat 2 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017).

Sebagai bentuk keterpaduan dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RENJA Perangkat Daerah tersebut berpedoman dan

mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2026. Dalam hal ini, pola keterpaduan dan kesinambungan dalam proses penyusunan RENJA-SKPD tersebut mengacu dan dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 dan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan diatas. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1.1.

Hubungan Rencana Kerja (RENJA) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain itu, sebagai wujud proses perencanaan partisipatif dan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 131 ayat 2 serta pasal 136 dan 137 PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017, maka dalam proses penyusunannya, dokumen RENJA Perangkat Daerah tersebut melibatkan partisipasi aktif instansi terkait 8 (delapan) wilayah Kabupaten/Kota serta pelaku pembangunan (*stakeholders*) yang diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten tahun 2026, untuk :

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan kabupaten/kota;
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Memperhatikan tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2026, yaitu *“Implementasi pembangunan kolaboratif yang inklusif sebagai perwujudan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”*, serta rumusan program/kegiatan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang disampaikan pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2026, maka ditetapkan tema perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2026, yaitu **“Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui implementasi pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk memwujudkan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”**.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang termaktub dalam dokumen rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2026, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana;

maka penyusunan RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 difokuskan pada upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan untuk urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dengan prioritas pembangunan terkait, yaitu prioritas 4 dan 5.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perangkat Daerah) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
29. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 112)
31. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);
32. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2026 disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2026 adalah :

1. Menetapkan prioritas pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten pada tahun 2026 sesuai dengan kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2026;
2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten tahun 2026 dituangkan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA yang didalamnya memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten tahun 2026.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026, serta uraian ringkas mengenai program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan rincian rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja-nya dan kebutuhan pendanaannya dari rencana kerja perangkat daerah Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut dari hasil penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah tahun 2026 ini.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN LALU



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN LALU

2.1. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu adalah dikaitkan dengan hasil rewieu pelaksanaan program dan kegiatan dalam RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas ESDM Tahun 2025 serta prakiraan capaian pelaksanaan RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.

Hasil rewieu untuk tahun 2024 kemudian diperbandingkan capaiannya terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RENSTRA Dinas ESDM Tahun 2023-2026 untuk target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan tahun 2025 menggunakan tabel analisis yang terdapat dalam Lampiran PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017, sehingga diperoleh pokok-pokok pikiran analisis sebagai berikut, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yan tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Di bawah ini diperlihatkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2025 diperbandingkan dengan target-targetnya di dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas ESDM Provinsi Banten dan Pencapaian Renstra ESDM Provinsi Banten sampai dengan Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2025	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7) x 100	9	10	11 = (10) x 100
3	URUSAN / PILIHAN									
3.25	BIDANG URUSAN / ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3.25.01	A. PROGRAM / SUBPROGRAM URUSAN / KEGIATAN (SALAH SATU/BEKAS)	Peningkatan Ketercapaian dan Kualitas Kegiatan pada Program Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Daerah Perindustri	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
3.25.01.1.01	1. Kegiatan / Peningkatan, Pengaplikasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kemampuan kegiatan Peningkatan, Pengaplikasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
3.25.01.1.01.0001	1.1 Sub kegiatan / Penyusunan Dokumen Peningkatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
3.25.01.1.01.0002	1.2 Sub kegiatan / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen PRA-SKPD	Jumlah Dokumen PRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Dokumen PRA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	6 Dokumen	16,67%
3.25.01.1.01.0003	1.3 Sub kegiatan / Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan PRA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan PRA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PRA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	6 Dokumen	16,67%
3.25.01.1.01.0004	1.4 Sub kegiatan / Koordinasi dan Penyusunan OFA-SKPD	Jumlah Dokumen OFA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen OFA-SKPD	8 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	25,00%	1 Dokumen	8 Dokumen	12,50%
3.25.01.1.01.0005	1.5 Sub kegiatan / Koordinasi dan Penyusunan Perakata SKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perakata SKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perakata SKA-SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	33,33%	1 Dokumen	6 Dokumen	16,67%
3.25.01.1.01.0006	1.6 Sub kegiatan / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Struktur Organisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Struktur Organisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Struktur Organisasi SKPD	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	25,00%	10 Laporan	48 Laporan	20,83%
3.25.01.1.01.0007	1.7 Sub kegiatan / Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30,00%	1 Laporan	7 Laporan	10,00%
3.25.01.1.01.0008	1.8 Sub kegiatan / Pelaksanaan Pengawasan dan Sanksi Administratif	Jumlah Data Sanksi Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diterbitkan sebagai Perangkat Daerah	2 Data	0 Data	0 Data	0 Data	0,00%	1 Data	1 Data	50,00%
3.25.01.1.01.0009	1.9 Sub kegiatan / Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berhimpunan Bidang Urusan yang Dimulai dalam Tiga Bulan Penyusunan Dokumen Peningkatan Perangkat Daerah	Jumlah Berka Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berhimpunan Bidang Urusan yang Dimulai dalam Tiga Bulan Penyusunan Dokumen Peningkatan Perangkat Daerah	2 Berka Acara	0 Berka Acara	0 Berka Acara	0 Berka Acara	0,00%	1 Berka Acara	1 Berka Acara	50,00%
3.25.01.1.02	2. Kegiatan / Koordinasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan kemampuan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
3.25.01.1.02.0001	2.1 Sub kegiatan / Penyelenggaraan dan Tanggapan ASN	Jumlah Orang yang Berencana dan Ber Tanggapan ASN	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	60 Orang/Bulan	59 Orang/Bulan	98,33%	70 Orang/Bulan	208 Orang/Bulan	72,67%
3.25.01.1.02.0002	2.2 Sub kegiatan / Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25,00%	12 Dokumen	30 Dokumen	25,00%
3.25.01.1.02.0003	2.3 Sub kegiatan / Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan terhadap Keuangan SKPD	40 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	30,00%	12 Dokumen	30 Dokumen	25,00%
3.25.01.1.02.0004	2.4 Sub kegiatan / Koordinasi dan Pelaksanaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengaplikasian keuangan SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25,00%	12 Dokumen	30 Dokumen	25,00%
3.25.01.1.02.0005	2.5 Sub kegiatan / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Hala Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Hala Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Hala Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,00%	1 Laporan	4 Laporan	25,00%
3.25.01.1.02.0006	2.6 Sub kegiatan / Peningkatan dan Penyusunan Sistem Tanggapan Pembinaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Sistem Tanggapan Pembinaan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,00%	1 Laporan	3 Laporan	25,00%
3.25.01.1.02.0007	2.7 Sub kegiatan / Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis/Transparansi Berbasis SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Berbasis/Transparansi Berbasis SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis/Transparansi Berbasis SKPD	12 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	83,33%	10 Laporan	30 Laporan	75,00%
3.25.01.1.02.0008	2.8 Sub kegiatan / Penyusunan Pelaporan dan Analisa Program/Proyek/Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Program/Proyek/Kelembagaan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,00%	1 Laporan	3 Laporan	25,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2028	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2028	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
1.25.01.1.03	7. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
1.25.01.1.03.001	7.1. Penyediaan Jasa Tuntutan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Tuntutan Masyarakat	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	8 Laporan	24 Laporan	50,00%
1.25.01.1.03.002	7.2. Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sumber Daya Air dan Lainnya yang Dipelemban	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	75,00%
1.25.01.1.03.004	7.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor yang Dipelemban	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	36 Laporan	75,00%
1.25.01.1.03	8. Kegiatan : Pemeliharaan Sarung 998 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Ketercapaian Pemeliharaan Sarung 998 Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
1.25.01.1.03.001	8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan, Perawatan, Oles, atau kendaraan Oles catatan	Jumlah kendaraan Perawatan Oles atau kendaraan Oles catatan yang Dipelemban dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00%	7 Unit	16 Unit	79,17%
1.25.01.1.03.002	8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan, kendaraan, Oles, Operasional dan Lainnya	Jumlah kendaraan Oles, Operasional atau Lapangan yang Dipelemban dan Dibayarkan Pajaknya	116 Unit	24 Unit	28 Unit	34 Unit	45,25%	11 Unit	50 Unit	43,10%
1.25.01.1.03.003	8.3. Pemeliharaan Perahu dan Motor Lainnya	Jumlah Perahu dan Motor Lainnya yang Dipelemban	322 Unit	118 Unit	122 Unit	124 Unit	101,64%	41 Unit	284 Unit	56,86%
1.25.01.1.03.005	8.4. Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelemban/Perbaikan	8 Unit	3 Unit	1 Unit	2 Unit	20,00%	1 Unit	8 Unit	25,00%
1.25.01.1.03.010	8.5. Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelemban/Perbaikan	8 Unit	3 Unit	6 Unit	8 Unit	100,00%	1 Unit	8 Unit	88,00%
1.25.01.1.03.011	8.6. Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelemban/Perbaikan	4 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Unit	0,00%
1.25.02	8. PROGRAM / PENGELOLAAN ASPEK KEBUDUDAYAAN	Penyediaan Ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengembangan Aspek Gedung dan Air Tanah	80,91 %	57,71 %	75,89 %	44,91 %	36,64%	81,29 %	81,11 %	91,21%
1.25.02.1.01	9. Kegiatan : Penerimaan Dana Kontribusi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan Daerah Persepsi	Penyediaan Ketercapaian Kegiatan Penerimaan Dana Kontribusi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan Daerah Persepsi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
1.25.02.1.01.001	9.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Data Kontribusi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan Daerah Persepsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Data Kontribusi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan Daerah Persepsi	36 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	50,00%	4 Dokumen	13 Dokumen	36,11%
1.25.02.1.01	10. Kegiatan : Penerimaan Nilai Persepsi Air Tanah dan Daerah Persepsi	Penyediaan Ketercapaian kegiatan Penerimaan Dana Kontribusi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan Daerah Persepsi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
1.25.02.1.01.001	10.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Persepsi Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Persepsi Air Tanah dan Daerah Persepsi yang Terkumpul	64 Dokumen	30 Dokumen	21 Dokumen	20 Dokumen	100,00%	21 Dokumen	78 Dokumen	64,06%
1.25.02.1.01.002	10.2. Pengumpulan, Penyelesaian dan Penerimaan Nilai Persepsi Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan, Penyelesaian dan Penerimaan Nilai Persepsi Air Tanah dan Daerah Persepsi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	75,00%
1.25.02.1.01.003	10.3. Pengumpulan dan Pengawasan Persepsi Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengumpulan dan Pengawasan Implementasi Nilai Persepsi Air Tanah dan Daerah Persepsi	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%	2 Laporan	13 Laporan	60,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PENDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2025	
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
1.26.03	C. PROGRAM PEMELUKAAN MINERAL DAN BATUBARA	Peningkatan Aksesibilitas Peta-peta Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	100,00 %	72,29 %	92,79 %	104,36 %	272,67%	88,36 %	104,36 %	104,36%
1.26.03.1.01	11. Kegiatan : Peningkatan Aksesibilitas Peta-peta Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	Peningkatan aksesibilitas Peta-peta Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00	100,00%
1.26.03.1.01.0001	11.1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Terumbu dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei yang Terpenuhi dan Tersedia	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	3 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
1.26.03.1.01.0002	11.2. Peningkatan dan Peningkatan Aksesibilitas Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Terumbu dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei yang Dibagikan dan Diakses	24 Dokumen	22 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	6 Dokumen	34 Dokumen	141,67%
1.26.03.1.01.0003	11.3. Pengembangan dan Peningkatan Pemantauan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei	Jumlah Laporan Hasil Pengamatan Pemantauan Wilayah dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Terumbu dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.26.03.1.02	12. Kegiatan : Penastabilan dan Usaha Pertambangan Mineral, Bukan Logam dan Batubara dalam rangka Pemertanian Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	Peningkatan aksesibilitas Peta-peta Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
1.26.03.1.02.0002	12.1. Koordinasi dan Sinergitas dalam rangka Penyusunan Usulan, Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan dan Pemertanian Modal	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinergitas dalam Penyusunan Usulan, Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan, Wilayah Pertambangan dan Pemertanian Modal	29 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	1 Laporan	100,00%	8 Laporan	22 Laporan	75,87%
1.26.03.1.02.0003	12.2. Penyusunan Paketisasi Perencanaan dan Hibrida dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam rangka Pemertanian Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	Jumlah Dokumen Paketisasi Perencanaan dan Hibrida dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	25 Dokumen	49 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	81 Dokumen	244,00%
1.26.03.1.02.0004	12.3. Pengembangan dan Peningkatan Pelaksanaan Perencanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam rangka Pemertanian Modal Dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Perencanaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara dalam Negeri pada Wilayah dan Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mei Laut	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	3 Laporan	75,00%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PERDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2023	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
1.20.02.1.04	11. Kegiatan : Penatausahaan dan Perambangan Fisik untuk Komoditas Mineral Logam, Sabdara, Mineral Bukan Logam, dan Bahan Galian Wilayah Perambangan Fisik	Penertiban dan penataan kegiatan Penatausahaan dan Perambangan Fisik untuk komoditas Mineral Logam, Sabdara, Mineral Bukan Logam, dan Bahan Galian Wilayah Perambangan Fisik	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
1.20.02.1.04.0002	12.1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan SPH dalam Lembaran Wilayah Perambangan dan Peramban Fisik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan SPH dalam Lembaran Wilayah Perambangan dan Peramban Fisik	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	8 Laporan	250,00%	8 Laporan	7 Laporan	87,50%
1.20.02.1.04.0003	12.2. Penyusunan dan Penataan Rekomendasi Persebaran dan Pembinaan dan Perambangan Fisik untuk Komoditas Mineral Logam, Sabdara, Mineral Bukan Logam, dan Bahan Galian Wilayah Perambangan Fisik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Persebaran dan Pembinaan dan Perambangan Fisik untuk Komoditas Mineral Logam, Sabdara, Mineral Bukan Logam, dan Bahan Galian Wilayah Perambangan Fisik	8 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.20.02.1.04.0004	12.3. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengujiannya Bersama Pemangku dan Perambangan Fisik (PP)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pengujiannya Bersama Pemangku dan Perambangan Fisik (PP)	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11 Laporan	275,00%	8 Laporan	10 Laporan	125,00%
1.20.05	0. PROGRAM PENGUJIAN ENERGI TERBARUKAN	Capaian ketesuksesan instalasi sistem dan pelayanan pemenuhan kebutuhan energi baru terbarukan	100,00 %	17,00 %	42,86 %	20,00 %	38,33%	75,00 %	75,00 %	75,00%
1.20.05.1.01	14. Kegiatan : Penatausahaan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	Penertiban dan penataan kegiatan Penatausahaan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00 %	100,00 %	100,00%
1.20.05.1.01.0001	14.1. Penetapan Prosedur dan Penyelenggaraan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	Jumlah Dokumen Prosedur dan Penyelenggaraan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas yang ditetapkan	8 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	8 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.20.05.1.01.0002	14.2. Penyusunan Rekomendasi, Persebaran dan Pembinaan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	Jumlah Dokumen rekomendasi Persebaran dan Pembinaan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.20.05.1.01.0003	14.3. Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Persebaran dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Persebaran dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	12 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0,00%	8 Laporan	1 Laporan	6,25%
1.20.05.1.02	15. Kegiatan : Penyelenggaraan Penyelidikan dan Pembinaan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	Penertiban dan penataan kegiatan Penyelenggaraan penyelidikan dan Pembinaan dan Perambatan Lapangan Panas Bumi Liris, Daerah Kabupaten/Kota Sebelah 1 (daerah) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Pelayaran 12 (dua belas) MI Dalam dan Luar Laut yang berstatus ke-hasil Persebaran Kapasitas	100,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	0,00 %	100,00 %	100,00%
1.20.05.1.02.0001	15.1. Penyusunan dan Penatausahaan Data Potensi Seismik	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penatausahaan Data Potensi Seismik	8 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	3 Dokumen	37,50%

KODE	URUSAN/IBD AND URUSAN PEMDA DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN S.D TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S.D TAHUN 2025	
					Target	Realisasi	Capaian		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x 100	9	10	11 = (10/4) x 100
1.26.00.1.01	10. Kegiatan : Pengembangan aspek energi baru terbarukan berupa solar rooftop, angin, air, dan tenaga air panas dan penelitian suhu lepas air dalam wilayah provinsi	Peningkat kemampuan kapaian Pengembangan aspek energi baru terbarukan berupa solar rooftop, angin, air, dan tenaga air panas dan penelitian suhu lepas air dalam wilayah provinsi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
1.26.00.1.01.0001	10.1. Peningkatan dan pengawalan aspek EBT (kegiatan lapangan, investasi di daerah)	Jumlah Laporan Peningkatan dan pengawalan aspek EBT (kegiatan lapangan, investasi) di daerah	8 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,00%	8 Laporan	7 Laporan	12,50%
1.26.00.1.01.0001	10.2. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aspek EBT	Jumlah Undilangsur kegiatan pemeliharaan aspek EBT	8 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	87,50%	11 Unit	12 Unit	100,00%
1.26.00.1.01.0010	10.3. Penyusunan dan pemantauan data potensi aspek EBT di daerah	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan dan pemantauan data potensi aspek EBT di daerah	8 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%
1.26.00	A. PROGRAM : PENDEKATAN POTENSIAL INTRIKAM									
		Pada Subda Kabupaten/Kota yang Menerapi Standar	40,17 %	43,87 %	43,42 %	198,31 %	119,31%	94,88 %	198,31 %	193,20%
		Capaian Pelayanan Publik untuk Wilayah Belum Berkecamatan Daerah Target dan Perbaikan	88.808 RTD	71.125 RTD	67.888 RTD	11.125 RTD	4618,04%	7.086 RTD	26.478 RTD	43,64%
1.26.00.1.01	11. Kegiatan : Peningkatan dan Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi	Peningkat kemampuan kapaian Peningkatan dan Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00%
1.26.00.1.01.0001	11.1. Peningkatan Prosedur dan Peningkatan dan Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Peningkatan dan Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi yang Disiapkan	24 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	17 Dokumen	70,83%
1.26.00.1.01.0002	11.2. Penyusunan Paket/Model Pelatihan dan Hibrida dan Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi	Jumlah sub-Paket/Model Pelatihan dan Hibrida dan Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi	110 Dokumen	147 Dokumen	15 Dokumen	200 Dokumen	200,00%	80 Dokumen	427 Dokumen	197,27%
1.26.00.1.01.0003	11.3. Pengembangan dan Peningkatan Paket/Model Pelatihan Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengembangan dan Peningkatan Paket/Model Usaha Penyediaan Tenaga Kerja Non Sektor Usaha MKK Negara dan Penguatan Tenaga Kerja serta Peningkatan Jaring-jaring Kapasitas Penyedia Tenaga Kerja dalam Daerah Provinsi	12 Laporan	9 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1,00%	1 Laporan	6 Laporan	50,00%
1.26.00.1.01	12. Kegiatan : Pengembangan untuk kegiatan Masyarakat Tokoh Masyarakat, Pembinaan Sarana Penyediaan Tenaga Kerja Sektor Berkecamatan, Daerah Target dan Perbaikan Perbaikan	Peningkat kemampuan kapaian Pengembangan untuk kegiatan Masyarakat Tokoh Masyarakat, Pembinaan Sarana Penyediaan Tenaga Kerja Sektor Berkecamatan, Daerah Target dan Perbaikan Perbaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%
1.26.00.1.01.0001	12.1. Pengembangan dan Peningkatan Pengembangan untuk kegiatan Masyarakat Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Pengembangan untuk kegiatan Masyarakat Tokoh Masyarakat	34 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100,00%	8 Laporan	18 Laporan	79,09%
1.26.00.1.01.0002	12.2. Pengembangan Sarana Penyediaan Tenaga Kerja Sektor Berkecamatan, Daerah Target dan Perbaikan	Jumlah Sarana yang Tertampung dalam Penyediaan Tenaga Kerja Sektor Berkecamatan, Daerah Target dan Perbaikan	29.125 RTD	8.000 RTD	8.000 RTD	8.000 RTD	100,00%	7.000 RTD	22.700 RTD	81,87%

Untuk indikator kinerja Kegiatan dalam dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026, Indikator kinerja kegiatan yang dievaluasi capaiannya adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) indikator kinerja sub kegiatan.

Terlihat pada tabel 2.1 diatas bahwa capaian kinerja kegiatan untuk 77 indikator indikator kinerja sub kegiatan (*Output*) bervariasi tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA setelah 3 dari 4 periode RENSTRA Perangkat Daerah dilaksanakan, yang secara pengelompokan terbagi menjadi 5 (lima) pengelompokan capaian, yaitu :

1. Telah melebihi target akhir periode RENSTRA (>100%)
Terdapat 11 indikator kinerja kegiatan atau 11,69% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya telah melebihi target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;
2. Telah mencapai target akhir periode RENSTRA (100%)
Terdapat 4 indikator kinerja kegiatan atau 5,19% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya telah sesuai dengan target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;
3. Telah melebihi target ideal 3 periode RENSTRA (>75%)
Terdapat 8 indikator kinerja kegiatan atau 10,39% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya telah melebihi target ideal 3 periode RENSTRA yang ditetapkan;
4. Telah mencapai target ideal 3 periode RENSTRA (75%)
Terdapat 18 indikator kinerja kegiatan atau 23,38% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya telah sesuai target ideal 3 periode RENSTRA yang ditetapkan;
5. Belum mencapai target ideal 3 periode RENSTRA (< 75%)
Terdapat 24 indikator kinerja kegiatan atau 31,17% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya belum mencapai target ideal 3 periode RENSTRA yang ditetapkan;

6. Baru tercapai kurang dari 50% dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 7 indikator kinerja kegiatan atau 9,09% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya kurang dari 50% dari target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;
7. Masih 0% dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 7 indikator kinerja kegiatan atau 9,09% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *output*-nya masih belum terealisasi dari target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan;

Perbedaan pencapaian 77 indikator kinerja kegiatan sebagaimana dijelaskan diatas adalah disebabkan beberapa hal, yaitu diantaranya :

1. Adanya distribusi target *output* yang tidak merata per tahun periode RENSTRA;
2. Adanya realisasi *output* yang melebihi target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode RENSTRA, misalkan *output* penerbitan rekomendasi teknis perijinan, pengadaan unit BMD sarana dan prasarana kantor, dan yang lainnya;
3. Adanya kebijakan prioritas penganggaran dalam proses perencanaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran, sehingga tidak semua target *output* yang ada dalam 2 tahun periode RENSTRA tersebut terealisasi.

Sedangkan untuk indikator kinerja Program (*Outcome*) dalam dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026, program yang dievaluasi capaiannya adalah 5 (lima) Program dengan 6 (enam) indikator kinerja program didalamnya.

Terlihat pada tabel 2.1 diatas bahwa dari 5 program dan 6 indikator kinerja program, bervariasi tingkat capaiannya dibandingkan dengan target akhir periode RENSTRA setelah 2 dari 4 periode RENSTRA Perangkat Daerah dilaksanakan, yang secara pengelompokan terbagi menjadi 3 (tiga) pengelompokan capaian, yaitu :

1. Telah melebihi target akhir periode RENSTRA (> 100%)
Terdapat 2 indikator kinerja program atau 33,33% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya telah melebihi target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah :
 - a. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar;
 - b. Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara;
2. Telah mencapai target akhir periode RENSTRA (100%)
Terdapat 1 indikator kinerja program atau 16,67% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya telah sesuai dengan target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah "Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi" yang merupakan indikator kinerja dari program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang target indikator kinerja program-nya adalah 100% untuk masing-masing tahun periode RENSTRA.
3. Telah melebihi target ideal 3 periode RENSTRA (>75%)
Terdapat 1 indikator kinerja program atau 16,67% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya telah melebihi target ideal 3 periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah "Persentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah".
4. Telah mencapai target ideal 3 periode RENSTRA (75%)
Terdapat 1 indikator kinerja program atau 16,67% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya telah sesuai target ideal 3 periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah "Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan".

5. Baru tercapai kurang dari 50% dari target akhir periode RENSTRA
Terdapat 1 indikator kinerja program atau 16,67% dari keseluruhan jumlah indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA Perangkat Daerah yang realisasi *outcome*-nya kurang dari 50% dari target akhir periode RENSTRA yang ditetapkan. Indikator kinerja program yang mencapai realisasi ini adalah “Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan”.

Perbedaan pencapaian 6 indikator kinerja program sebagaimana dijelaskan diatas adalah disebabkan beberapa hal, yaitu diantaranya :

1. Adanya distribusi target *output* yang tidak merata per tahun periode RENSTRA dan berpengaruh terhadap target dan capaian indikator kinerja program per tahunnya. Demikian pula halnya apabila ada realisasi *output* yang melebihi atau kurang dari target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun periode RENSTRA. Hal ini disebabkan karena target semua indikator kinerja program adalah ditentukan oleh pencapaian target *output* dalam Definisi Operasionalnya ;
2. Adanya indikator kinerja program, yaitu “Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi” yang target indikator kinerja program-nya adalah 100% untuk masing-masing tahun periode RENSTRA.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Capaian kinerja pelayanan organisasi Dinas ESDM Provinsi Banten dianalisa berdasarkan tingkat pencapaian target indikator kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU) berdasarkan target yang telah diamanatkan dalam dokumen Dokumen RPD Provinsi Banten dan RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2023-2026 untuk periode sampai dengan tahun 2024. Analisis capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten tersebut, dilakukan dengan mengacu pada Definisi Operasional (DO) dari masing-masing indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Analisa capaian kinerja dilakukan terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Banten untuk sampai dengan periode 2024, dengan hasil pengukuran sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Dinas ESDM Tahun 2024

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Capaian SAMIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai)	DERI DARIAWAN, S.T, M.MT	nilai	70-80	78,95	100,00	Untuk pengukuran realisasinya pada tahun 2024, hasil Review atas Implementasi AKIP DESDM Tahun 2024 oleh Inspektorat Provinsi Banten, maka nilai realisasi "Capaian SAMIP Perangkat Daerah" Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024, yaitu sebesar Nilai 78,95
2	Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)	DERI DARIAWAN, S.T, M.MT	persen	70,01	76,20	106,84	<p>Hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Sasaran terkait Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral sampai dengan Trivulan IV adalah sebesar 76,20% dari target 70,01% di akhir tahun 2024.</p> <p>Angka tersebut diperoleh dari pengukuran realisasi output dari komponen pembentuk DO-nya (pengukuran tertampir).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase sebesar 59,55% adalah nilai realisasi s.d kondisi akhir 2023 - Persentase sebesar 16,65% selebihnya adalah realisasi komponen pembentuk DO s.d Desember 2024 sehingga jumlahnya menjadi 76,20%, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian dokumen informasi potensi geowisata, yaitu Pembuatan Signboard Geopark Ujung Kulon/BayahDome; Pembuatan Video Profil Geopark Ujung Kulon; dan Updating Signboard Geosite/Survey Geohertage. 2. Dokumen Rekontak Perijinan Pertambangan Mineral dan Batubara, terealisasi 75 dokumen dari target yang hanya 13 dokumen sampai dengan air tahun 2024, 3. Dokumen sumber data mineral sebanyak 13 dokumen dari target 13 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024, 4. Dokumen pengendalian teknis pelaku usaha mineral pendelegasian sebanyak 13 Dokumen dari target 13 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024; 5. Dokumen Rekontak Perijinan Penggunaan Air Tanah serta Dokumen Pengendalian Geologi dan Air Tanah yang terealisasi 100% sesuai permohonan dan pengaduan yang masuk

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan (%)	DERI DARIAWAN, S.T, M.MT	persen	15,00	10,34	68,93	<p>Hasil pengukuran realisasi indikator kinerja Sasaran terkait Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 10,34%.</p> <p>Angka tersebut diperoleh dari pengukuran Jumlah Kapasitas Terpasang Pemanfaatan EBT dibagi dengan Jumlah Potensi EBT di Provinsi Banten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi EBT di Provinsi Banten 1.238,83 MW - Kapasitas Terpasang Pemanfaatan EBT di Provinsi Banten 128,08 MW
		Rasio Elektrifikasi (%)	DERI DARIAWAN, S.T, M.MT	persen	99,99	99,99	100,00	<p>Nilai Rasio Elektrifikasi di akhir tahun 2024 adalah sebesar 99,99%, dimana nilainya adalah sama dengan kondisi Rasio Elektrifikasi di akhir Tahun 2023.</p> <p>Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten TA. 2024 maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi di tahun 2024, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2023 sebesar 52.568 RTS menjadi berkurang 40.661 RTS (11.907 RTS dengan rincian 8.200 RTS APBD, 3.707 APBN)</p>
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA							94,44	

Memperhatikan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2024 untuk 4 (empat) indikator kinerja Sasaran Strategis (IKU) sebagaimana dinyatakan pada tabel 2.2, terlihat bahwa pencapaian rata-rata kinerja IKU Dinas ESDM Provinsi Banten di tahun 2024 adalah 94,44%, capaian ini diperoleh dari semua Sasaran.

Selain Indikator Kinerja Sasaran Strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas ESDM Provinsi Banten untuk periode 2024, analisis dilakukan pula terhadap indikator kinerja kunci dari program (*Outcome*) Dinas ESDM Provinsi Banten di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, dengan hasil pengukuran sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3. dibawah ini :

Tabel. 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2024

Sasaran	Indikator Program	Program	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100	100,00	100,00
Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Aspek Geologi Dan Air Tanah (%)	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	70,89	68,51	96,65
	Prosentase Ketersediaan Pelayanan Informasi dan Pengendalian Mineral dan Batubara (%)	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	63,19	134,36	212,63
Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan (%)	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	42,86	25,00	58,33
	Cakupan Pelayanan Listrik untuk Wilayah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (RTS)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	17.000	11.907	70,04
	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan yang Memenuhi Standar (%)	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	83,42	100,33	120,28
RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM					109,65

Dibawah ini disampaikan analisis dan penjeleasan teknis dari realisasi dan capaian 4 (empat) indikator kinerja Sasaran Staregis (IKU) sebagaimana disebutkan pada tabel 2.2 diatas :

SASARAN STRATEGIS 1 :	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang urusan energi dan sumber daya mineral	
Indikator Kinerja Sasaran	Capaian SAKIP Perangkat Daerah (Satuan : Nilai)
Target Tahun 2024	70-80
Realisasi Tahun 2024	78,95
Program terkait	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Capaian SAKIP OPD merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah yang baik, bersih, dan berwibawa”. Indikator kinerja ini menggambarkan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah di perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. IKU ini merupakan IKU untuk seluruh urusan perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran strategis utama perangkat daerah sesuai TUPOKSI dan target RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026. Aktualisasi dan implementasi dari IKU ini adalah program dan kegiatan di unit kerja Sekretariat/Bagian Tata Usaha Perangkat Daerah.

Pengukuran realisasi target dari indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan Definisi Operasional (DO) yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu :

Tabel 2.4 Definisi Operasional dan Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Capaian SAKIP OPD

KOMPONEN	BOBOY	SUB KOMPONEN
1 Perencanaan Kinerja	30	Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja
2 Pengukuran Kinerja	25	Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
3 Pelaporan Kinerja	15	Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja
4 Evaluasi Kinerja	10	Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5 Pencapaian Kinerja	20	Kinerja yang Dilaporkan, Output dan Outcome dan Kinerja Lainnya
TOTAL	100	

Untuk pengukuran realisasinya pada tahun 2024, Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 sebesar 78,95 dari Target Renstra 70-80 berdasarkan hasil review Inspektorat Provinsi Banten yang tertuang dalam Berita Acara Penilaian Hasil Monitoring LKIP Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Hasil review Inspektorat Provinsi Banten terhadap
Capaian SAKIP OPD Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2024

NO	KOMPONEN	NILAI	Prosentasi Capaian
1	2	3	4
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)			
I	Sistem Akuntabilitas Instansi		
	1. Perencanaan Kinerja (30%)	23,70	79,00%
	2. Pengukuran Kinerja (25%)	22,50	75,00%
	3. Pelaporan Kinerja (15%)	12,75	80,00%
	4. Evaluasi Internal (10%)	20,00	80,00%
	Capaian Nilai SAKIP	78,95	78,95%
II	Capaian Kinerja (20%)	0,00	0,00%
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		78,95	78,95

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam upaya mempertahankan penilaian implementasi SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 diatas adalah melalui :

1. Penyediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan perangkat daerah yang akuntabel dan memiliki kesesuaian dengan parameter penilaian
2. Penatausahaan keuangan dan penyediaan laporan keuangan yang akuntabel dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Penyediaan Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD;

SASARAN STRATEGIS 2	
Meningkatnya pengembangan dan pengendalian aspek kegeologian dan sumber daya mineral	
Indikator Kinerja	: Indeks ketersediaan pelayanan Informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral (Satuan : %)
Target Tahun 2024	: 70,01%
Realisasi Tahun 2024	: 76,20%
Program terkait	: 1. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah pada Misi ke **3 Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari** diarahkan untuk :

1. Peningkatkan pelayanan ketersediaan informasi aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara yang mencakup informasi potensi bencana alam geologi (kegempaan, gerakan tanah, tsunami dan likuifaksi), informasi pengembangan geowisata (geopark dan geoversidity), informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Dana Bagi Hasil Pajak sektor pertambangan mineral dan batubara;
2. Peningkatan kualitas pelayanan perusahaan air tanah dan pertambangan mineral dan batubara;
3. Peningkatan pengendalian aspek kegeologian dan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan hidup.

Indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dan ketidakberhasilan upaya pembangunan tersebut diatas adalah **Indeks Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral** yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) untuk menunjukkan sasaran perangkat daerah, yaitu "Meningkatnya Pengembangan dan Pengendalian Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral".

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

$$\% = \frac{\Sigma \text{Informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang tersedia tahun (x)}}{\Sigma \text{informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral yang dibutuhkan}} \times 100$$


Berdasarkan hasil pengukuran dengan data-data output dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU tersebut yang terealisasi di tahun 2024, maka IKU Indeks Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral terealisasi sebesar 76,20% di Tahun 2024. Realisasi IKU tersebut di tahun 2024 telah melampaui target tahun 2024 sebesar 70,01% atau tercapai sebesar 108,84%.

Berikut perhitungan dan pengukuran IKU Indeks Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral berdasarkan tabel Definisi Operasional (DO) yang tercantum dalam RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

Tabel 2.6
Data pengukuran IKU Indeks Ketersediaan Pelayanan Informasi Aspek Kegeologian dan Sumber Daya Mineral Tahun 2024

No	Jenis Informasi yang dibutuhkan (dokumen)	Satuan	Dibutuhkan	Basisline (2023)	2023	TARGET				REALISASI				
						2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Informasi potensi migrausi kabendakan geologi													
	a. gerak tanah	Kecamatan	52	9	5	9	9	9	9	6	0	0	0	0
	b. likuifaksi	Kecamatan	58	12	0	5	8	10	10	0	0	0	0	0
	c. kegempaan	Kecamatan	119	105	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d. Geologi Tata Lingkungan	Kecamatan	115	84	0	48	28	0	0	48	0	0	0	0
2	Informasi geowisata													
	a. Geopark/Sustainability	Kecamatan	104	22	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0
3	Informasi pengendalian air tanah													
	a. rekamatah perijinan air tanah	Kecamatan	188	16	55	55	55	55	55	55	55	0	0	0
	b. pemetaan zona terdampak air tanah	Kecamatan	56	0	0	14	14	14	14	14	14	0	0	0
	c. pengendalian air tanah	Kecamatan	188	16	55	55	55	55	55	55	55	0	0	0
4	Informasi potensi sumber daya pertambangan	Dokumen	39	38	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
5	Informasi pengendalian limbah													
	a. rekamatah perijinan limbah perolehan	Dokumen	65	0	8	13	14	14	15	17	75	0	0	0
	b. pengendalian teknis pelaku usaha limbah perolehan	Dokumen	21	0	4	4	4	4	4	5	11	0	0	0
	c. Sumber Data Pertambangan Limbah	Dokumen	42	0	5	10	10	10	10	10	11	0	0	0
Jumlah tahun			1.427	372	195	221	221	185	187	253	136	0	0	0
Jumlah akumulasi per tahun			1.427	372	387	788	909	1.184	1.170	851	1.087	1.087	1.087	1.087
% (tahun-ri)			100,00	25,38	13,94	15,33	14,75	11,94	13,08	14,83	15,45	0,00	0,00	0,00
% (akumulasi per tahun)			100,00	25,38	39,72	55,15	70,01	81,94	96,03	96,55	76,20	76,20	76,20	76,20

Catatan : 1) Adalah jumlah Kecamatan di Banten


 Kepala
 2023 2024

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam mewujudkan Indeks ketersediaan pelayanan informasi aspek kegeologian dan sumber daya mineral pada tahun 2024 diatas adalah melalui :

1. Pelayanan perusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah melalui penerbitan Rekomendasi Teknis, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
2. Pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pembinaan perusahaan pertambangan MINERBA dan Air Tanah;
3. Pengendalian dan pembinaan Penambang Tanpa Ijin (PETI);

4. Pengembangan potensi dan penyediaan sumber data MINERBA, Air Tanah, Geowisata, dan Mitigasi Bencana;
5. Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang MINERBA, Geologi dan Air Tanah, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan unsur swasta selaku pelaku usaha, investor, maupun penyedia IPTEK.
6. Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan *good mining practice*, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang MINERBA, Geologi dan Air Tanah terkini, serta peningkatan kompetensi aparatur teknis terkait;

SASARAN STRATEGIS 3.1 :	
Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	
Indikator Kinerja	: Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan
Target Tahun 2024	: 15,00%
Realisasi Tahun 2024	: 10,34%
Program terkait	: Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi focus utama untuk memenuhi kebutuhan energy yang semakin meningkat sekaligus mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai peran yang krusial dalam menghadapi tantangan seiring meningkatnya kebutuhan energi dan dampak negative terhadap lingkungan. Dalam kontek ini, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk merancang kebijakan yang mendukung pengembangan infratraktur energy baru terbarukan sebagai solusi untuk kebutuhan energy yang semakin meningkat. Keberhasilan pemanfaatan energy baru terbarukan sebagai solusi untuk kebutuhan energy yang semakin meningkat. Keberhasilan pemanfaatan energi baru terbarukan membutuhkan langkah konkrit dari pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai aspek, termasuk perizinan, pengelolaan sumber daya alam, dan mempromosikan inovasi teknologi yang ramah lingkungan.

Indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dan ketidakberhasilan upaya pemanfaatan energi baru terbarukan tersebut diatas adalah **Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan** yang merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) untuk menunjukkan sasaran perangkat daerah, yaitu " Meningkatkan Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal ".

Untuk pengukuran capaian IKU tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

$$\% = \frac{\Sigma \text{Pemanfaatan langsung EBT tahun (x)}}{\Sigma \text{Potensi pemanfaatan langsung EBT}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran internal dengan data-data output dari pembentuk Definisi Operasional (DO) IKU tersebut yang terealisasi di tahun 2024, maka IKU Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan terealisasi sebesar 10,34% di Tahun 2024 dimana Angka tersebut diperoleh dari pengukuran Jumlah Kapasitas Terpasang Pemanfaatan EBT dibagi dengan Jumlah Potensi EBT di Provinsi Banten.

Berikut perhitungan dan pengukuran IKU Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan berdasarkan tabel Definisi Operasional (DO) yang tercantum dalam RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2023-2026.

$$\% = \frac{128,08 \text{ MW}}{1.238,83 \text{ MW}} \times 100\%$$

$$\% = 10,34\%$$

Tabel 2.7
Data pengukuran IKU Persentase Pemanfaatan Langsung EBT Tahun 2023

Persentase pemanfaatan langsung energi baru terbarukan			
Jenis EBT	Potensi (MW)	Realisasi (MW)	Keterangan
Biomassa	346,50	84,54	Olah data Co-Firing (DEN)
PLTS	820,33	28,04	DESDM dan PLN
PLTMH	72,00	15,50	PLN
TOTAL	1.238,83	128,08	
Persentase Realisasi (%)		10,34	

Catatan : Sumber Data Potensi EBT dari Dewan Energi Nasional (DEN)

Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam Cakupan ketersediaan informasi potensi dan pelayanan pemanfaatan langsung energi baru terbarukan pada tahun 2024 diatas adalah melalui :

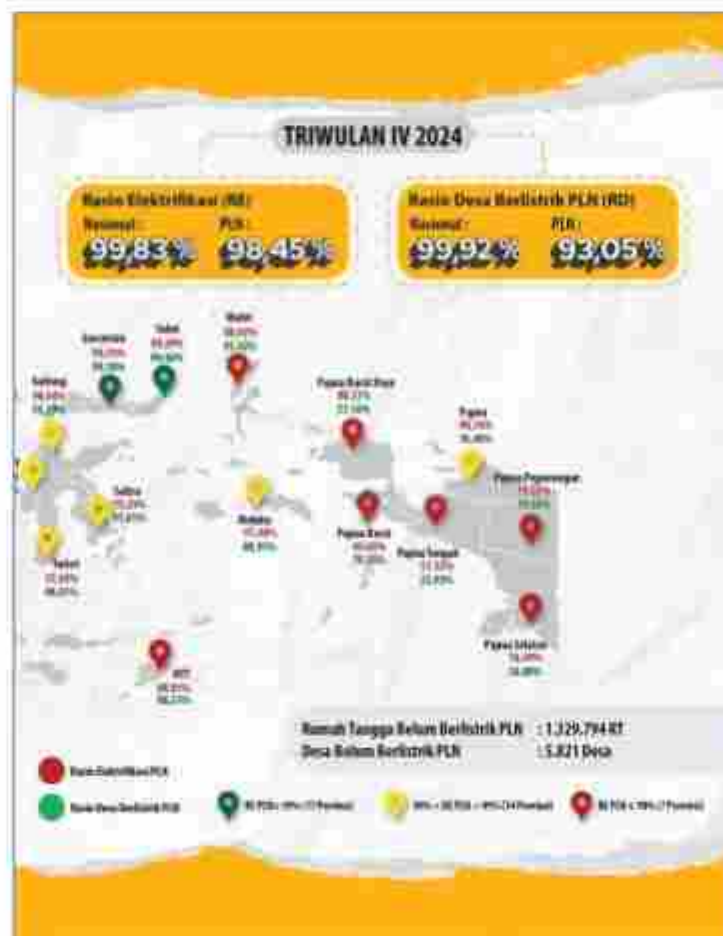
1. Pemanfaatan Potensi Biomasa;
2. Pemanfaatan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH);
3. Pemanfaatan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Nilai capaian IKU “Persentase Pemanfaatan Langsung Energi Baru Terbarukan” sebesar 10,34% di Tahun 2024 ini adalah berdasarkan hasil verifikasi BAPPEDA Provinsi Banten dalam penyusunan LKPj Provinsi Banten Tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS 3.2 :	
Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	
Indikator Kinerja	: Rasio Elektrifikasi
Target Tahun 2024	: 99,99%
Realisasi Tahun 2024	: 99,99%
Program terkait	: Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Rasio Elektrifikasi merupakan indikator kinerja utama untuk mengaktualisasi sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal”. Indikator kinerja ini menggambarkan tingkat prosentase masyarakat yang telah terakses infrastruktur listrik, baik secara konvensional (PT. PLN) atau pun melalui pembangkit energi baru terbarukan (EBT), dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), atau yang lainnya.

Sampai dengan tahun 2024, Rasio Elektrifikasi Banten telah mencapai 99,99% (versi Kementerian ESDM 99,97%), lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 99,83% sesuai info di instagram resmi @infogatrik Kementerian ESDM dengan isi berita : Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 periode Triwulan IV Ditetapkan.



Gambar 2.1. Data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2024 (DJK, Kementerian ESDM)

Realisasi capaian Rasio Elektrifikasi sebesar **99,99%** diatas adalah sama dengan target kinerja yang direncanakan dalam RENSTRA Perangkat Daerah maupun RPD Provinsi Banten Tahun 2024 yang menargetkan rasio elektrifikasi Banten sebesar **99,99%** pada tahun 2024 atau tercapai sebesar 100,02%.

Untuk pengukuran capaian IKU Rasio Elektrifikasi tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

$$\% = \frac{\text{Jumlah RTS telah berlistrik}}{\text{Jumlah RTS}} \times 100\%$$

Catatan :
RTS : Rumah Tangga Sasaran

Dibawah ini adalah tabel data hasil pengukuran IKU Rasio Elektrifikasi Tahun 2024 untuk 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten beserta akumulasinya untuk wilayah Provinsi Banten, sebagaimana terlihat di tabel dibawah ini Untuk pengukuran capaian IKU Rasio Elektrifikasi tersebut, digunakan definisi operasional sebagai berikut, yaitu :

Tabel 2.8
Data pengukuran Rasio Elektrifikasi Provinsi Banten Tahun 2024

PENGUKURAN RASIO ELEKTRIFIKASI BANTEN TAHUN 2024

Kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Berlistrik dari Pemegang Wilayah Listrik (PT, PLN dan KWH)		Rumah Tangga Berlistrik dari Selain Pemegang Wilayah Listrik				Rumah Tangga Berlistrik (Tidak Elektrifikasi)		Rumah Tangga Tanpa Listrik		Penambahan RTS Berlistrik Tahun 2024 (APBD dan APBN)	
		Rumah Tangga	%	Rumah Tangga Berlistrik A.P.T. (Non-PLN)		Rumah Tangga Berlistrik Non-PT, PLN		Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	APBD	APBN
				Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+7)	10	11=(12-11)	12	13	14
Kab. Latak	385.517	377.078	96,44	11.955	3,11	488	0,14	349.223	90,51	388	0,10	2.000	568
Kab. Pangrehing	397.254	392.632	98,83	4.426	1,14	0	0,00	388.206	97,72	25	0,01	2.000	327
Kab. Tangrang	624.601	613.528	98,21	11.292	1,80	0	0,00	602.236	96,42	41	0,01	1.968	2.873
Kab. Serang	385.062	374.467	97,24	10.617	2,76	0	0,00	363.850	93,20	25	0,01	3.832	
Kota Tangrang	200.170	199.140	99,49	0	0,00	0	0,00	199.140	99,49	24	0,01	62	519
Kota Cilegon	108.391	107.189	98,84	1.202	1,10	0	0,00	105.987	97,80	1	0,01	20	
Kota Serang	156.496	156.323	99,91	1.320	0,84	0	0,00	155.003	98,99	8	0,01	286	
Kota Tangrang Selatan	211.331	211.177	99,93	0	0,00	0	0,00	211.177	99,93	0	0,01	21	170
Provinsi Banten	2.985.294	2.952.498	98,91	40.661	1,36	488	0,02	2.911.459	97,53	426	0,14	8.200	3.207

Catatan :

Nilai Rasio Elektrifikasi di akhir tahun 2024 adalah sebesar 99,99%, dimana nilainya adalah sama dengan kondisi Rasio Elektrifikasi di akhir Tahun 2023.

Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten TA. 2024 maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi di tahun 2024, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang tersisa di tahun 2023 sebesar 52.568 RTS menjadi berkurang 40.661 RTS (11.907 RTS dengan rincian 8.200 RTS APBD, 3.707 APBN)

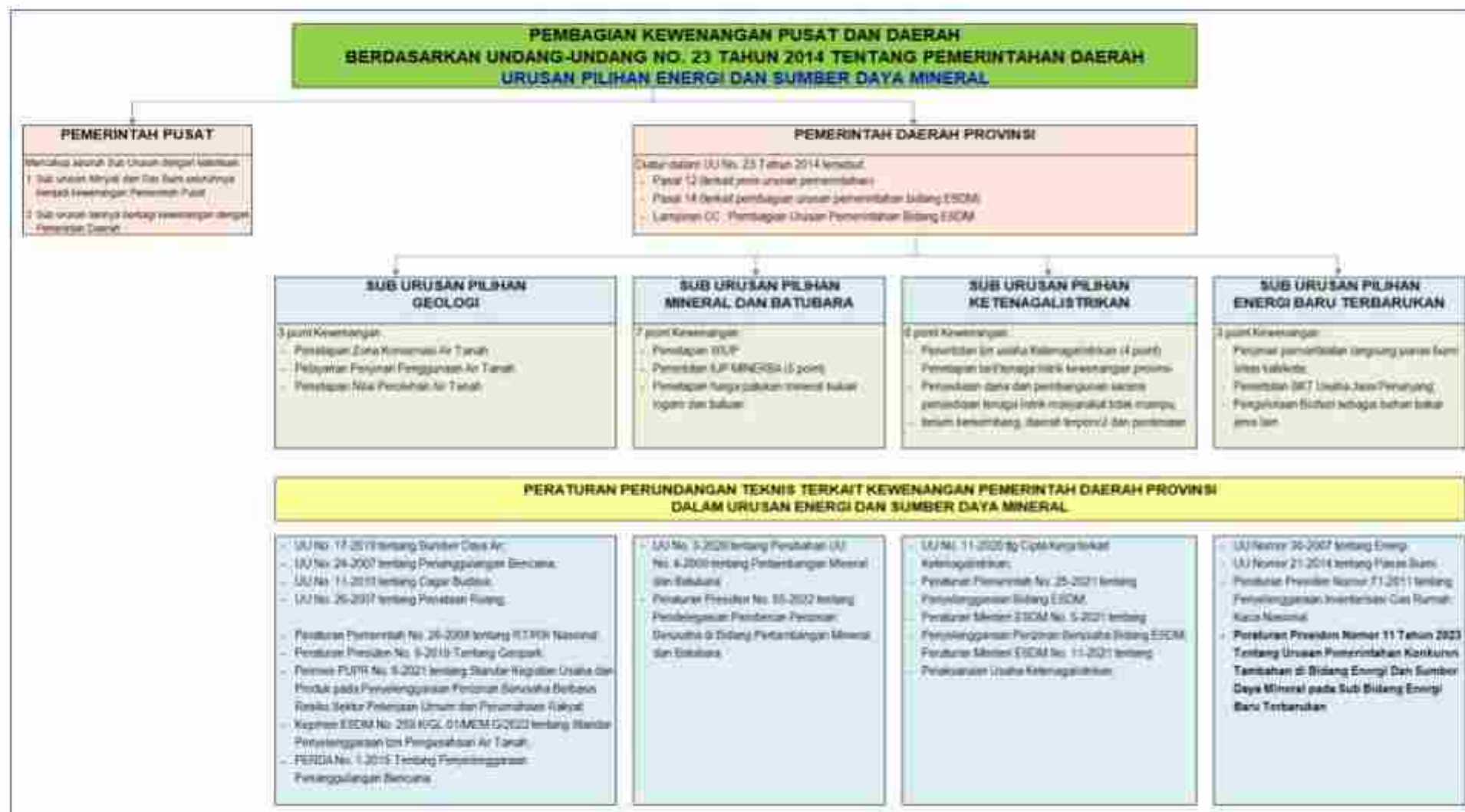
Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten dalam mewujudkan peningkatan Rasio Elektrifikasi Banten pada tahun 2024 diatas adalah melalui :

- ❖ Pembangunan listrik perdesaan dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan;
- ❖ Penyusunan perencanaan dan kajian teknis di bidang ketenagalistrikan;
- ❖ Pelayanan perusahaan ketenagalistrikan melalui penerbitan Rekomtek Ketenagalistrikan, baik untuk Perijinan maupun Non Perijinan
- ❖ Koordinasi terpadu dengan pelaku kebijakan di bidang ketenagalistrikan, baik di tingkat Pusat, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa, maupun dengan PT. PLN (persero) selaku *leading sector* penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.
- ❖ Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan konservasi energi (penggunaan energi hemat, penggunaan energi alternatif), ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan, serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang ketenagalistrikan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berkenaan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten serta urusan pemerintahan yang dilaksanakan, dilandasi oleh kewenangan Provinsi dalam pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral, yang secara administrasi pemerintahan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut, kewenangan Provinsi dalam urusan energi dan sumber daya mineral mencakup 4 dari 5 Sub Urusan dari Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan cakupan yaitu Sub Urusan Geologi dan Air Tanah, Sub Urusan Mineral dan Batubara; Sub Urusan Energi Terbarukan; Sub Urusan Ketenagalistrikan, dan Sub Urusan Minyak dan Gas, untuk sub urusan ini, tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi.

Dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas, detail teknis kewenangan Provinsi Banten diatur pula dalam peraturan perundangan-undangan terkait sesuai dengan bidang kewenangannya, sebagaimana terlihat di Gambar 2.2 dan 2.3.



Gambar 2.2 Kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan

Tabel 2.9 Uraian teknis kewenangan Provinsi di Sektor ESDM berdasarkan Peraturan Perundangan

NO	SUB URUSAN KEWENANGAN	URAIAN TEKNIS KEWENANGAN	PERATURAN PERUNDANGAN
A.	GEOLOGI DAN AIR TANAH	1. Pengelolaan Air Tanah Kewenangan Provinsi	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air - Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kepmen ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah
		2. Mitigasi Kebencanaan Alam Geologi	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (pasal 8) - PERDA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
		3. Pengembangan Geopark	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya - Peraturan Presiden No. 9 tahun 2019 Tentang Geopark
		4. Pemetaan Geologi dan Tata Lingkungan untuk Perencanaan Tata Ruang Wilayah	- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
B.	MINERAL DAN BATUBARA	1 Pemberian Sertifikat Standar 2 Pemberian Perizinan Berusaha yang Didelegasikan 3 Pembinaan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang Didelegasikan 4 Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang Didelegasikan 5 Kewenangan atas Dukungan Pemberian Perizinan Berusaha yang Didelegasikan	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

NO.	SUB URUSAN KEWENANGAN	URAIAN TEKNIS KEWENANGAN	PERATURAN PERUNDANGAN
C.	KETENAGALISTRIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perizinan Berusaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) 2 Perizinan Berusaha Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) dengan Kapasitas diatas 500 kW 3 Perizinan Berusaha Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kapasitas ≤ 500 kW (Wajib Laporan) 4 Perizinan Berusaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Non PMA 5 Pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi; 6 Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang Perizinan Berusahanya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. 7 Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan untuk Provinsi 8 Penetapan rencana umum Ketenagalistrikan Daerah 9 Pengesahan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 Persetujuan Harga Jual dan Sewa Tenaga Listrik 11 Rekomendasi Wilayah Usaha untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Distribusi dan Penjualan) 12 Penetapan Tingkat Mutu Pelayanan dan Standar Mutu Keandalan Sistem Tenaga Listrik 13 Pengangkatan inspektur Ketenagalistrikan untuk Provinsi 14 Penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan Listrik Perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No. 11 tahun 2020 ttg Cipta Kerja terkait Ketenagalistrikan; - Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM; - Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bidang ESDM; - Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan;

NO.	SUB URUSAN KEWENANGAN	URAIAN TEKNIS KEWENANGAN	PERATURAN PERUNDANGAN
D.	ENERGI BARAU TERBARUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 2. Rencana Aksi Penurunan Gas Rumah Kaca 3. Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 Ton Per Tahun 4. Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional - Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan
E.	MINYAK DAN GAS BUMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 kg 2. Penetapan Kuota LPG 3 Kg Per Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi 3. Penetapan Kuota Bahan Bakar Minyak Subsidi JBT dan JBKP 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara garis besar isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, per Sub Urusan dari Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

A. Sub Urusan Energi Baru Terbarukan

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan energi fosil (BBM, Gas dan Batubara) yang saat ini menjadi sumber energi utama, sementara kebutuhan energi untuk dalam pembangunan dan kehidupan sehari-hari terus meningkat, maka pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu solusinya, selain karena alasan keterbatasan diatas dan potensi sumber EBT yang sangat besar, sumber energi baru terbarukan juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil yang menyebabkan emisi gas rumah kaca.

Sebagai ilustrasi gambaran, dapat dilihat di gambar 2.7 terkait Potret Energi Nasional, tergambarakan bahwa potensi EBT Nasional adalah sebesar 801,2 GW yang setara dengan potensi untuk melistriki 800 juta rumah.

Demikian halnya di Provinsi Banten, potensi EBT-nya cukup potensial dan terdiri dari beberapa jenis EBT. Pengembangan dan pemanfaatan potensi EBT tersebut, secara fisik kontruksi, masih didominasi oleh peran Pemerintah Pusat melalui pendanaan APBN atau kerjasama dengan investor baik luar atau dalam negeri. Peran dan kontribusi Provinsi dalam pemanfaatan dan pengembangan EBT ini masih kecil, selain dikarenakan kendala teknologi dan besarnya biaya investasi, juga diakibatkan oleh komitmen pimpinan daerah dalam penetapan prioritas pembangunan yang lebih mendesak.



Gambar 2.3. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) Nasional

No	Jenis EBT	Potensi
1	Panas Bumi	626 MW
	Sumber Daya	261
	Cadangan	365
2	Minihidro dan Mikrohidro	72 MW
3	Tenaga Surya	2.461 MW
4	Bayu	1.513 MW
5	Bioenergi	465,1 MW
	Biomasa/ Biofuel	346,5
	Biogas	118,6
6	Sampah Kota	13,09 Mwe
	TPA Cilowong	2,18
	TPA Rawa Kucing	10,07
	TPA Badegung	0,84

Sumber : (Pusat EBTSM 2012)

Gambar 2.4. Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Banten.



Gambar 2.5. Rencana pengembangan dan pemanfaatan EBT di Provinsi Banten oleh Pusat

Selain kendala sebagaimana disebutkan diatas, saat ini peran Provinsi dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan, terutama dalam perencanaan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, dimana dengan diwajibkannya daerah menerapkan penyusunan perencanaan pembangunan daerahnya sesuai nomenklatur dan kodefikasi perencanaan pembangunan daerah sesuai KEPMENDAGRI No. 90 Tahun 2021 dan pemutakhirnya KEPMENDAGRI No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Namun kendala tersebut diatas telah ada titik terang dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan. Urusan Sub Bidang Energi Baru Terbarukan yang ditambahkan sebagai urusan konkruen Provinsi tersebut adalah :

1. Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi
2. Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi
3. Pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi
4. Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
5. Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
6. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.

Dalam proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, telah ada update atau pemutakhiran terhadap KEPMENDAGRI No. 90 Tahun 2021 dengan pemutakhiran terakhirnya, yaitu KEPMENDAGRI No. 900.1.15.5-1.317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam Kepmendagri tersebut nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan untuk implementasi PERPRES Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan telah dapat tersedia dan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerjanya.

B. Sub Urusan Ketenagalistrikan

Di sektor infrastruktur ketenagalistrikan, untuk kondisi tahun 2023 di wilayah Provinsi Banten terdapat beberapa pembangkit listrik yang mampu membangkitkan daya listrik sekitar 8.974 MW untuk memenuhi kebutuhan Banten maupun di luar Banten, dengan kondisi eksisting sebagai berikut :

Tabel 2.10 Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Banten tahun 2023

No	Nama Pembangkit	Jenis	Pemilik	MW
1	Suralaya 1-7	PLTU	Indonesia Power	3.400
2	Suralaya 8	PLTU	PLN	625
3	Cilegon	PLTGU	PLN	740
4	Labuan 1-2	PLTU	PLN	625
5	Lontar 1-3	PLTU	PLN	945
6	Lestari Banten Energi (LBE)	PLTU	IPP	625
7	Jawa 7	PLTU	IPP	2000
8	Ciseno	PLTM	IPP	3
9	Situmulya	PLTM	IPP	3
10	Lebak Tundun	PLTM	IPP	8
JUMLAH				8.974

Berdasarkan data PLN, pemakaian daya listrik di Banten saat ini sebesar 3.929 MW. Bila melihat kapasitas pembangkit yang ada di Banten sebesar 8.974 MW, maka kebutuhan tersebut terpenuhi, bahkan surplus dan bisa dipasok keluar Banten kedalam jaringan Jawa-Madura-Bali (JAMALI), sehingga Banten sangat layak di sebut sebagai **LUMBUNG ENERGI**.

Dan dengan akan segera beroperasi dan dibangunnya pembangkit listrik tambahan sebesar 5.000 MW, maka kapasitas daya listrik akan menjadi 13.974 MW, sehingga berdasarkan proyeksi pertumbuhan beban sampai dengan tahun 2024 sebesar 5.101 MW, maka ketersediaan energi listrik sampai 5 tahun kedepan sangat siap untuk mendukung perekonomian dan iklim investasi di Provinsi Banten.

Tabel 2.11 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Banten

No	Nama Pembangkit	Jenis	Pemilik	MW	Keterangan
1	Suralaya 9	PLTU	PLN	1.000	Konstruksi
2	Suralaya 10	PLTU	PLN	1.000	Konstruksi
3	Jawa 5	PLTU	IPP	1.000	Rencana 2023
4	Jawa 9	PLTU	IPP	1.000	Rencana 2023
5	Jawa 10	PLTU	IPP	1.000	Rencana 2023
JUMLAH				5.000	

Walaupun dapat dinyatakan sebagai “LUMBUNG ENERGI”, namun masih banyak rumah tangga di Banten yang belum mendapatkan akses tenaga listrik karena faktor kewilayahan (terpencil, belum berkembang, dan perdesaan) atau karena faktor ekonomi (miskin/tidak mampu).

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, Dinas ESDM Provinsi Banten telah secara aktif mengalokasikan anggaran pembangunannya untuk melaksanakan **PEMBANGUNAN LISTRIK PERDESAAN** yang merupakan bantuan listrik gratis kepada rumah tangga di perdesaan dan masyarakat miskin perkotaan, dalam rangka peningkatan Rasio Elektrifikasi dan kesejahteraan masyarakat Banten.

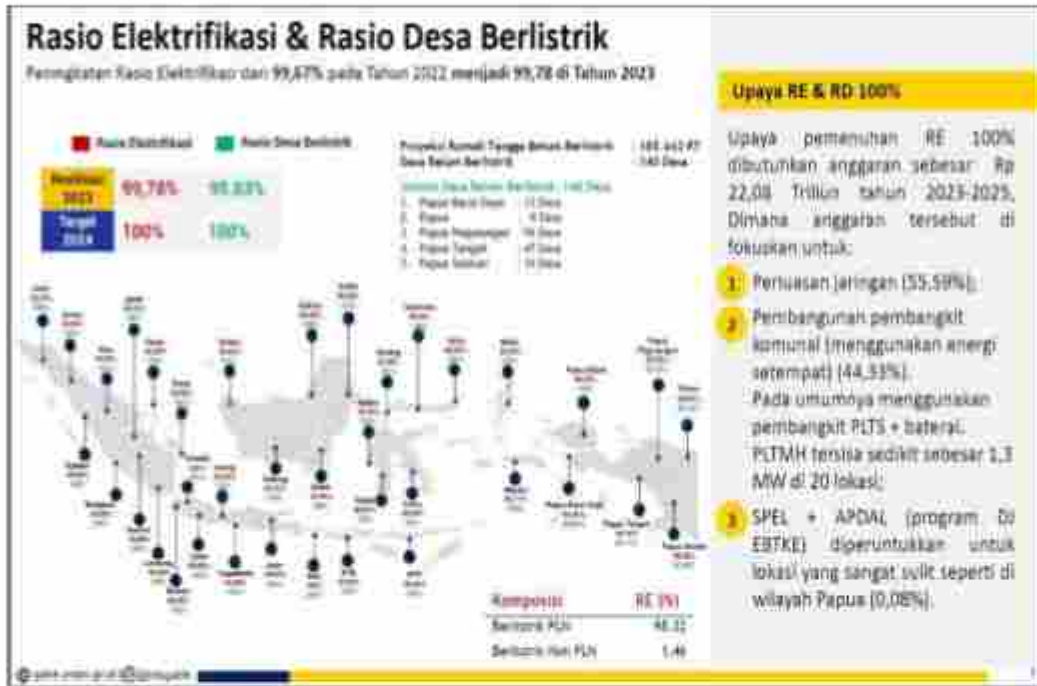
Hingga tahun 2023 (2003-2023), program Pembangunan Listrik Perdesaan ini telah memberikan bantuan listrik kepada 279.183 rumah tangga sasaran (RTS) yang ada di 8 kabupaten/kota se Provinsi Banten sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.12.

Tabel 2.12. RTS Terpasang Listrik Perdesaan Tahun 2003-2023 melalui Pendanaan APBD Provinsi Banten

KABUPATEN/KOTA	RTS TERPASANG (2003-2023)
1. Kab. Lebak	84.997
2. Kab. Pandeglang	80.282
3. Kab. Serang	56.674
4. Kota Serang	10.435
5. Kota Cilegon	6.365
6. Kab. Tangerang	39.733
7. Kota Tangerang Selatan	583
8. Kota Tangerang	114
BANTEN	279.183

Sampai dengan tahun 2023, Rasio Elektrifikasi Banten telah mencapai 99,99%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 99,78% sesuai Press Release Kementerian ESDM tanggal 18 Januari 2024 dengan isi berita : Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024.

Dan untuk kondisi sampai dengan tahun 2023, masih terdapat kurang lebih 52,5 ribu rumah tangga di Banten yang belum berlistrik secara mandiri (telah berlistrik tapi dengan cara “menyalur” dan tidak memiliki KWH) yang tersebar di 8 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.13.



Gambar 2.6 Data Rasio Elektrifikasi Banten Tahun 2023
(Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM)

Tabel 2.13. RTS Belum Berlistrik Mandiri per Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Tangga	Rumah Tangga dengan Listrik PLN (RTM mandiri)		Rumah Tangga dengan Listrik PLN Non RTM		Rumah Tangga dengan Listrik Non PLN		Rumah Tangga Berlistrik (Rasio Elektrifikasi)		Rumah Tangga Tanpa Listrik	
		Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (3+7)	10	11 = (10-9)	12
Kali Jelang	189.517	134.804	71,20	14.293	7,56	499	0,26	149.596	79,20	396	0,20
Kali Pandeglang	327.254	303.438	92,72	6.801	2,10	0	0,00	310.239	94,91	17	0,01
Kali Tanggung	824.320	808.704	98,10	16.615	2,01	0	0,00	825.319	99,99	41	0,01
Kali Serang	395.083	372.613	94,31	12.469	3,15	0	0,00	385.082	96,91	10	0,01
Kota Tangerang	503.170	503.144	99,99	0	0,00	0	0,00	503.144	99,99	26	0,01
Kota Cilegon	108.141	107.189	99,13	1.107	1,02	0	0,00	108.296	99,94	3	0,01
Kota Serang	154.856	154.725	99,98	1.131	0,73	0	0,00	155.856	99,99	8	0,01
Kota Tangerang Selatan	303.009	303.115	99,98	41	0,01	0	0,00	303.156	99,99	14	0,01
Provinsi Banten	2.493.086	2.481.583	99,53	13.568	0,54	0	0,00	2.495.151	99,89	438	0,02

Catatan : Nilai Rasio Elektrifikasi di akhir tahun 2023 adalah sebesar 99,99%, dimana nilainya adalah sama dengan kondisi Rasio Elektrifikasi di akhir Tahun 2022.

Hasil pembangunan listrik perdesaan melalui APBD Provinsi Banten TA. 2023 maupun yang dilaksanakan oleh Pusat (APBN), tidak menyebabkan kenaikan Rasio Elektrifikasi di tahun 2023, karena sasaran terpasangnya listrik perdesaan tersebut adalah untuk menangani Rumah Tangga Berlistrik dengan Listrik PLN (Non KWH), dimana kondisinya yang terlistrik di tahun 2022 sebesar 63.907 RTS menjadi berkurang 32.568 RTS (8.500 RTS APBD, 2.839 APBN).

Selain upaya pembangunan infrastruktur listrik untuk masyarakat tidak mampu, terpencil dan perdesaan, Dinas ESDM juga, sesuai amanat Undang Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, memfasilitasi **sektor perusahaan ketenagalistrikan** oleh swasta di Banten untuk supply kebutuhan industri atau swasta lainnya, melalui rangkaian **pembinaan, pelayanan rekomendasi teknis dan pengendalian perusahaan ketenagalistrikan**, dengan cakupan :

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
3. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Sampai dengan tahun 2021, per bulan Juni 2021 (2015-2021), Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengeluarkan Rekomendasi Teknis Perijinan Perusahaan Ketenagalistrikan sebanyak 801 dokumen yang tersebar Badan Usahanya di 8 Kabupaten/Kota sebagaimana ditunjukkan di tabel 2.14 dan Tabel 2.15.

Penyediaan energi listrik dengan cakupan jumlah badan usaha di tabel adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Daya terpasang dari 585 Badan Usaha Pemegang IUPTLS (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri) yang tersebar di Provinsi Banten untuk sifat penggunaan Utama, Cadangan maupun Darurat sebanyak **2.106.185 kVA**
2. Sedangkan, Kapasitas Daya terpasang dari 5 Badan Usaha Pemegang IUPTLU (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum) yang tersebar Badan Usahanya di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon sebanyak **667 MW**

Tabel 2.14.
Jumlah REKOMTEK Perusahaan Ketenagalistrikan (2015-2021)

TAHUN	JENIS PERIZINAN			JUMLAH
	IUPTLS	IUJPTL	IUPTL	
2015	11	2	0	13
2016	34	19	1	54
2017	75	52	1	128
2018	82	33	0	115
2019	202	51	2	255
2020	114	28	1	143
2021	67	26	0	93
TOTAL	585	211	5	801

Tabel 2.15.
Jumlah REKOMTEK Perusahaan Ketenagalistrikan s.d 2021 per Kabupaten/Kota

TAHUN	JENIS PERIZINAN			JUMLAH
	IUPTLS	IUJPTL	IUPTL	
Kab. Tangerang	169	42	0	211
Kota Tangerang	120	59	0	179
Kota Tangsel	75	50	1	126
Kab. Serang	103	5	1	109
Kota Serang	11	33	0	44
Kota Cilegon	60	19	3	82
Kab. Pandeglang	22	3	0	25
Kab. Lebak	25	0	0	25
TOTAL	585	211	5	801

C. Sub Urusan Minyak dan Gas Bumi

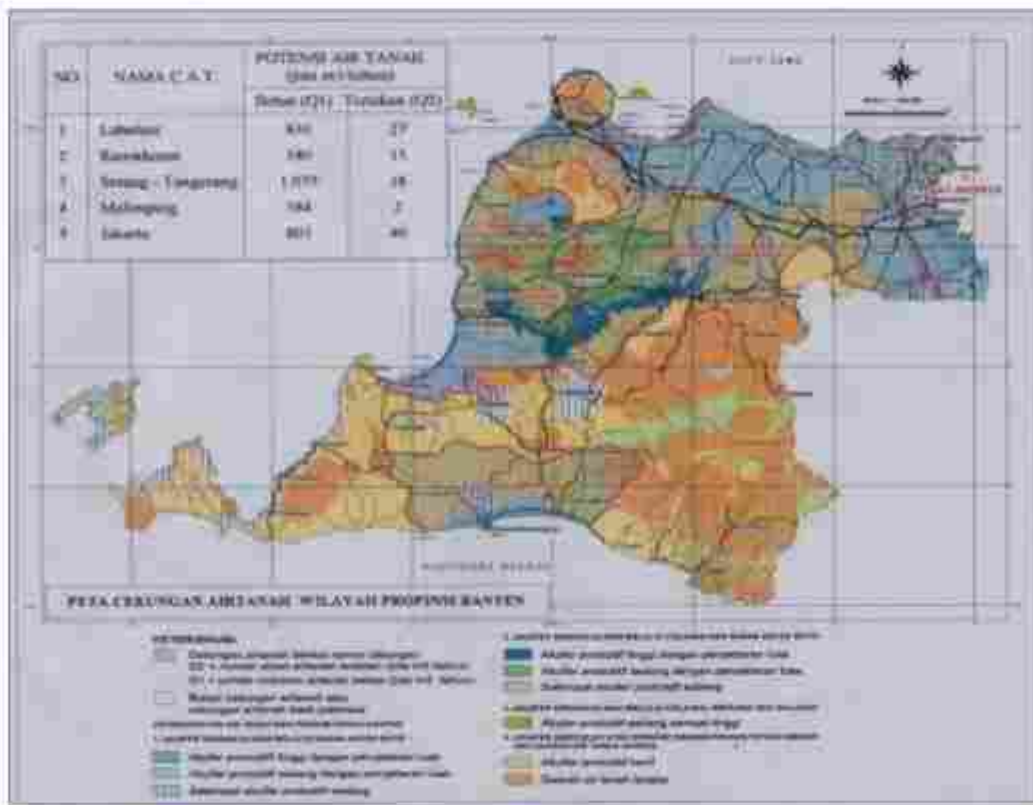
Sub Urusan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Provinsi tidak memiliki kewenangan di sub sektor Minyak dan Gas Bumi ini, namun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor energi dan sumber daya mineral, Provinsi, dalam hal ini Gubernur, dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, memiliki peran di sub urusan MIGAS sebagai berikut, yaitu :

1. Mengkoordinasikan usulan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Kuota LPG 3 kg Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
2. Mengkoordinasikan dan memantau ketahanan pasokan BBM di SPBU di wilayah Provinsi pada saat Hari Raya dan/atau Tahun Baru.

D. Sub Urusan Geologi dan Air Tanah

Sub Urusan ini, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Provinsi dan juga perangkat daerah, menangani beberapa urusan, yaitu diantaranya pengelolaan air tanah di CAT kewenangan Provinsi, penyediaan informasi aspek kegeologian (potensi kebencanaan geologi, potensi pengembangan geowisata, dan geologi tata lingkungan), serta aspek-aspek pengendalian di dalamnya.

Dalam pengelolaan Air Tanah, peraturan perundangan-undangan yang menjadi pijakan perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan sub urusan selain Undang-Undang No. 23 tahun 2014, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tersebut ditetapkan bahwa kewenangan pengelolaan air tanah adalah berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Cekungan Air Tanah (CAT), dimana Provinsi memiliki kewenangan untuk CAT lintas Kabupaten/Kota, dalam hal ini, yaitu CAT Malingping, CAT Labuan, dan CAT Rawadano, dari 5 CAT yang ada dan melalui Provinsi Banten (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT), sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.7 dan Tabel 2.16.



Gambar 2.7. Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Banten

Kewenangan Provinsi dalam pengelolaan Air Tanah, di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air tersebut ditetapkan menjadi urusan pekerjaan umum. Namun, dalam operasionalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sektor PUPR, urusan pengelolaan air tanah Provinsi, ditetapkan, menjadi kewenangan perangkat daerah yang menangani urusan energi dan sumber daya mineral.

Tabel 2.16. Data Cekungan Air Tanah Provinsi Banten (Kepres No. 26 Tahun 2011)

No. CAT	NAMA CAT	KOORDINAT (Bujur)	KOORDINAT (Lintang)	LUAS CAT (km ²)	LOKASI	VETERANJAN			
						a	b	c	d
06	Labuhan	105°41' 33,39" - 106°06' 2,32"	06°15' 56,37" - 06° 34' 45,79"	724	Provinsi Banten 1. Kabupaten Pandeglang 2. Kabupaten Lebak		x		
07	Rawaanas	105°49' 25,67" - 106°02' 58,85"	06°16' 49,97" - 06° 17' 47,74"	375	Provinsi Banten 1. Kabupaten Pandeglang 2. Kabupaten Serang		x		
08	Serang-Tangerang	105°34' 31,87" - 106° 42' 36,35"	05°55' 05,57" - 06° 30' 16,84"	2.822	Provinsi Banten 1. Kabupaten Serang 2. Kabupaten Tangerang 3. Kota Tangerang 4. Kota Cilegon 5. Kota Serang 6. Kabupaten Lebak 7. Kabupaten Pandeglang 8. Kota TANGSEL Provinsi Jawa Barat > Kabupaten Bogor			x	
09	Malinging	105°41' 04,44" - 106°05' 30,04"	06°29' 10,38" - 06° 31' 4,22"	707	Provinsi Banten 1. Kabupaten Pandeglang 2. Kabupaten Lebak		x		
70	Jakarta	106° 38' 32,54" - 107° 04' 04,70"	06°00' 41,50" - 06° 26' 58,23"	1.499	Provinsi Banten 1. Kabupaten Tangerang 2. Kota Tangerang 3. Kota TANGSEL Provinsi DKI Jakarta > Seluruh Wilayah Kota Provinsi Jawa Barat 1. Kabupaten Bogor 2. Kota Bekasi 3. Kabupaten Bekasi 4. Kota Depok			x	

Untuk penyediaan informasi aspek kegeologian, Dinas ESDM Provinsi Banten telah secara aktif dan bertahap melaksanakan survey, pemetaan, kajian-kajian, dan koordinasi terpadu Pusat dan Daerah (provinsi dan

kabupaten/kota) untuk penyediaan informasi potensi bencana geologi (kegempaan, gerakan tanah, tsunami dan likuifaksi) serta potensi geowisata/geopark.

Basis penyediaan informasi adalah kecamatan di Provinsi Banten berdasarkan ketersediaan potensinya dan proses penyediaan informasi tersebut telah dimulai dari periode RENSTRA sebelumnya dan s.d kondisi tahun 2021, prosenstase ketersediannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.17.

Tabel 2.17. Penyediaan Data dan Informasi Aspek Kegeologian

No.	Jenis Informasi yang Dibutuhkan	Satuan	Dibutuhkan	Basallna (2017)	2018	2019	2020	2021	Jumlah	%
1	Informasi potensi mitigasi bencana geologi									
	a. gerakan tanah	Kecamatan	62	0	2	2	2	2	8	12,90
	b. likuifaksi	Kecamatan	58	0	0	0	0	12	12	20,69
	c. kegempaan	Kecamatan	155	85	6	10	12	13	106	68,39
	d. Geologi Tata Lingkungan	Kecamatan	155	32	12	12	12	16	84	54,19
2	Informasi geowisata									
	> Geopark/Geodiversity	Kecamatan	106	0	1	5	5	11	22	20,94
3	Informasi pengendalian air tanah									
	> pemetaan zona konservasi air tanah	Kecamatan	56	0	0	0	0	0	0	0,00



Gambar 2.8.

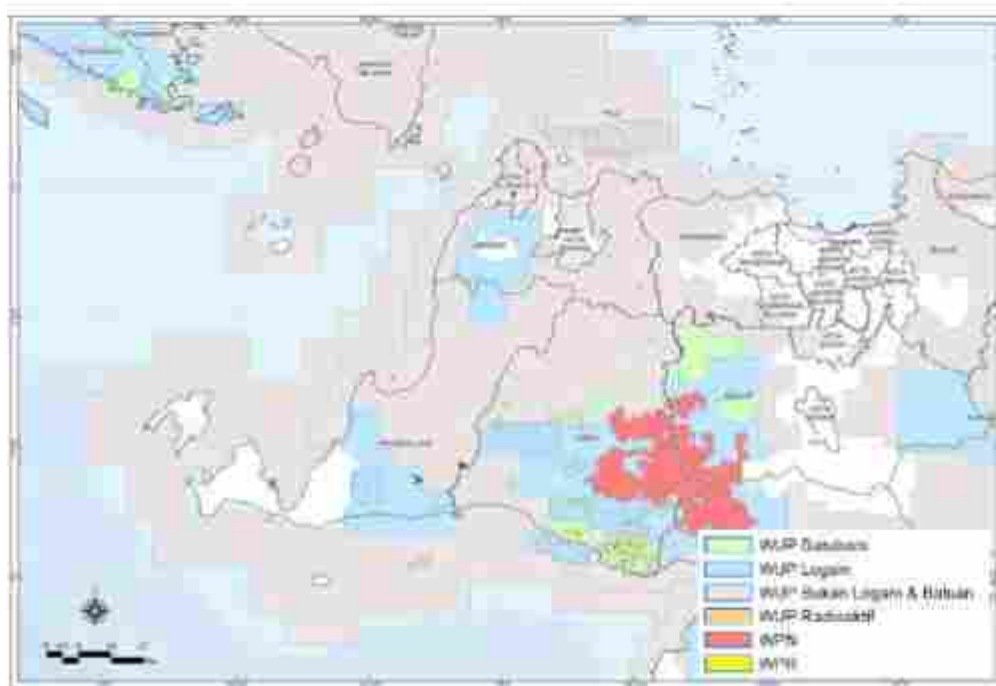
Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi bencana alam geologi)



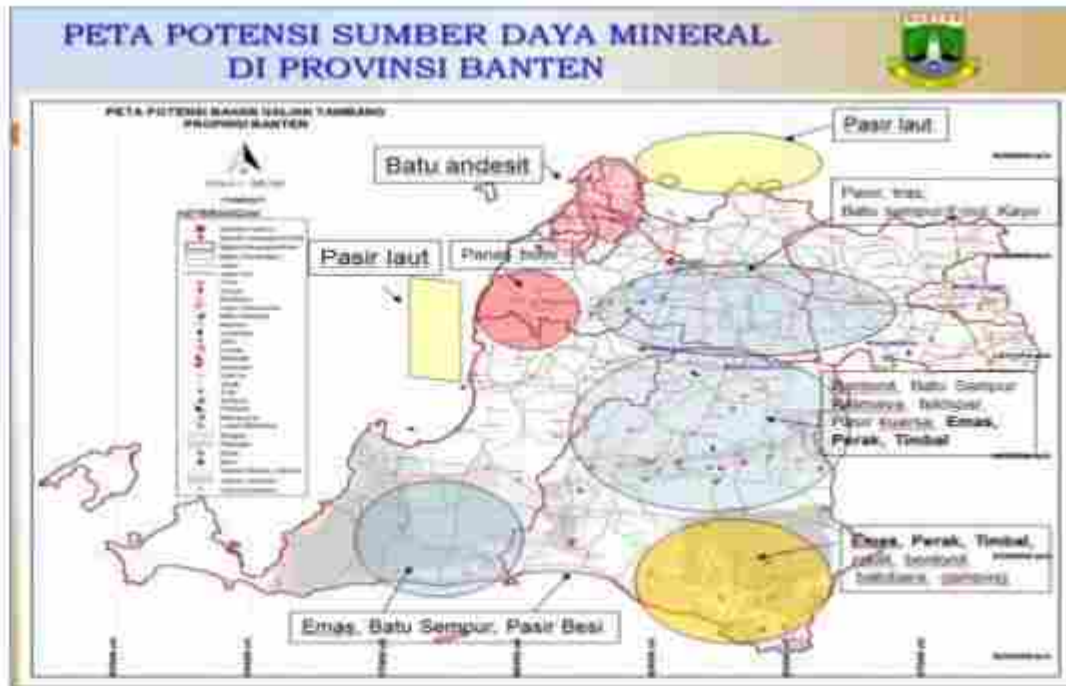
Gambar 2.9. Jejak Tsunami Krakatau 1883 di Kab. Pandeglang, salah satu hasil penyediaan informasi aspek kegeologian (informasi potensi geopark)

E. Sub Urusan Mineral dan Batubara

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya mineral, dimana sebaran jenis komoditasnya hampir merata di wilayah kabupaten/kota dan memiliki cadangan keterdapatan yang cukup potensial untuk dikembangkan kedepannya, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.7, terkait Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1204K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali serta Gambar 2.8 dan Gambar 2.9 terkait potensi cadangan dan keterdapannya.



Gambar 2.10. Peta Wilayah Pertambangan Provinsi Banten



Gambar 2.11. Peta Potensi Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten



Gambar 2.12. Potensi Cadangan Sumber Daya Mineral di Provinsi Banten

Potensi sumber daya mineral dan batubara di Provinsi Banten ini merupakan salah satu sub sektor yang memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan perekonomian di Provinsi Banten melalui eksploitasi sumber daya pertambangan mineral dan batubara yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas ESDM) dan/atau Pusat (Kementerian ESDM) sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Provinsi yang secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan tidak dapat melaksanakan program dan kegiatannya di tahun 2021.

Perkembangan status kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi tersebut menjadi isu strategis Provinsi di tahun 2020 dan 2021, dimana telah dilaksanakan koordinasi intensif antara Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri) dan Daerah Provinsi untuk membuka wacana pendelegasian kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi untuk jenis komoditas sumber daya mineral tertentu. Status hukum pendelegasian kewenangan ini telah menjadi menjadi jelas di tahun 2022 dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana untuk Mineral Non Logam dan Batuan didelegasikan kewenangannya ke Pemerintah Provinsi, baik dalam hal pemberian izin usaha, pengelolaan, pembinaan dan juga pengawasan dan pengendaliannya.

Memperhatikan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten per Sub Urusan dari Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai dijelaskan diatas, berikut adalah isu-isu strategis perencanaan pembangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten yang akan menjadi fokus penanganan pembangunan untuk periode tahun 2025, yaitu :

1. Mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi dalam hal pembangunan tematik, yaitu :
 - a. Tematik Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui penanganan kebutuhan infrastruktur Listrik Perdesaan (IR dan SR) untuk **Meningkatkan Akses Ketenagalistrikan Rumah Tangga Mandiri di Banten** yang teridentifikasi masih terdapat sekitar 50 ribu-an RTS yang belum memiliki akses listrik mandiri;
 - b. Tematik Pengendalian Laju Inflasi melalui pengawasan, pengendalian dan pemantauan laju inflasi sektor energi dan sumber daya mineral;
 - c. Tematik Peningkatan Investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan rekomentasi teknis sektor energi dan sumber daya mineral (air tanah, ketenagalistrikan dan pertambangan mineral dan batubara)
2. Pengembangan dan penerapan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil dalam rangka pemenuhan bauran energi nasional;
3. Mendukung pengendalian dan mitigasi kebencanaan geologi melalui penyediaan informasi dan sosialisasi;
4. Mendukung pengembangan kepariwisataan melalui pengembangan geowisata;
5. Mendukung pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pengendalian dan pembinaan pertambangan mineral dan batubara;
6. Isu-isu strategis nasional maupun lokal Provinsi Banten yang harus mendapatkan penanganan khusus oleh Dinas ESDM

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 dilakukan melalui penelaahan atas kebijakan perencanaan pembangunan Provinsi Banten tahun 2026 yang tertuang dalam naskah dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Hasil telaahan terhadap naskah dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 tersebut diperoleh ketentuan bahwa rencana kerja perangkat daerah adalah mengacu pada rencana kerja perangkat daerah yang tercantum dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2022 tentang RENSTRA Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026, yaitu untuk rencana kerja perangkat daerah untuk periode tahun 2026.

Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan review atas rencana kerja perangkat daerah yang tercantum dalam Rancangan RKPD Tahun 2026 dengan rencana kerja kebutuhan perangkat daerah tahun 2026 melalui penyusunan matriks Review Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Tabel. 2.18. Dalam hal ini rencana kerja kebutuhan perangkat daerah tahun 2026 dimaksud adalah mengacu pada rencana kerja perangkat daerah hasil kesepakatan dalam Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2026.

Tabel 2.18 Review Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026

NO.	RANCANGAN RAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KESIMPULAN TAHUN 2026					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program PENYUKSES (PESAN, POKER) DAN DESDM PROVINSI		Peningkatkan ketercapaian dan tingkat kegiatan pada Program Penyukkes (dalam Penunjang) Daerah Provinsi (%)	100,00	28.753.400,000	Program PENYUKSES (PESAN, POKER) DAN DESDM PROVINSI		Peningkatkan ketercapaian dan tingkat kegiatan pada Program Penyukkes (dalam Penunjang) Daerah Provinsi (%)	100,00	28.753.400,000	Seluruh
			Peningkatkan ketercapaian kegiatan, Peningkatan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Penunjang Daerah (%)	100,00	600.000,000			Peningkatkan ketercapaian kegiatan, Peningkatan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Penunjang Daerah (%)	100,00	600.000,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah (Dokumen)	2	100.000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah (Dokumen)	2	100.000,000	
1.2	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RAA/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen RAA/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen RAA/DPO (Dokumen)	1	10.000,000	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen RAA/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen RAA/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen RAA/DPO (Dokumen)	1	10.000,000	
1.3	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen Perantara RAA/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perantara RAA/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen Perantara RAA/DPO (Dokumen)	1	10.000,000	Kelembagaan dan Penyusunan Dokumen Perantara RAA/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perantara RAA/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen Perantara RAA/DPO (Dokumen)	1	10.000,000	
1.4	Kelembagaan dan Penyusunan SPK/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen SPK/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen SPK/DPO (Dokumen)	1	7.500,000	Kelembagaan dan Penyusunan SPK/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen SPK/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen SPK/DPO (Dokumen)	1	7.500,000	
1.5	Kelembagaan dan Penyusunan Perantara SPK/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perantara SPK/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen Perantara SPK/DPO (Dokumen)	1	7.500,000	Kelembagaan dan Penyusunan Perantara SPK/DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Perantara SPK/DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Dokumen Perantara SPK/DPO (Dokumen)	1	7.500,000	
1.6	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPO	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPO (Laporan)	2	50.000,000	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPO	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Capaian Kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPO (Laporan)	2	50.000,000	
1.7	Evaluasi Kinerja Penunjang Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penunjang Daerah (Laporan)	1	200.000,000	Evaluasi Kinerja Penunjang Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penunjang Daerah (Laporan)	1	200.000,000	
1.8	Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Tim Kerja Sama Daerah yang telah Disiapkan dan Berjalan (Laporan Penunjang Daerah)	1	40.000,000	Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Tim Kerja Sama Daerah yang telah Disiapkan dan Berjalan (Laporan Penunjang Daerah)	1	40.000,000	
1.9	Peningkatan Fungsi Penunjang Daerah Berorientasi Bidang Usaha yang Terpadu dan Mengintegrasikan Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Kerja Sama Hasil Fungsi Penunjang Daerah Berorientasi Bidang Usaha yang Terpadu dan Mengintegrasikan Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah	1	20.000,000	Peningkatan Fungsi Penunjang Daerah Berorientasi Bidang Usaha yang Terpadu dan Mengintegrasikan Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah	Provinsi Banten	Jumlah Kerja Sama Hasil Fungsi Penunjang Daerah Berorientasi Bidang Usaha yang Terpadu dan Mengintegrasikan Dokumen Perencanaan Penunjang Daerah	1	20.000,000	
5	Kelembagaan Keuangan Penunjang Daerah		Peningkatkan ketercapaian kegiatan, Peningkatan, Keuangan Penunjang Daerah (%)	100,00	22.571.140,000	Kelembagaan Keuangan Penunjang Daerah		Peningkatkan ketercapaian kegiatan, Peningkatan, Keuangan Penunjang Daerah (%)	100,00	22.571.140,000	
5.1	Penyediaan SPP dan Anggaran Adm	Provinsi Banten	Jumlah SPP yang diterima, SPP dan Anggaran Adm (Anggaran)	24	24.122.140,000	Penyediaan SPP dan Anggaran Adm	Provinsi Banten	Jumlah SPP yang diterima, SPP dan Anggaran Adm (Anggaran)	24	24.122.140,000	
5.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Adm	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Adm (Dokumen)	31	600.000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Adm	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Adm (Dokumen)	31	600.000,000	
5.3	Peningkatan Pemeliharaan dan Pengoperasian Keuangan DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengoperasian Keuangan DPO (Dokumen)	31	0,000,000	Peningkatan Pemeliharaan dan Pengoperasian Keuangan DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Pemeliharaan dan Pengoperasian Keuangan DPO (Dokumen)	31	0,000,000	
5.4	Kelembagaan dan Pelaksanaan Fungsi DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Hasil Kelembagaan dan Pelaksanaan Fungsi DPO (Dokumen)	12	0,000,000	Kelembagaan dan Pelaksanaan Fungsi DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Hasil Kelembagaan dan Pelaksanaan Fungsi DPO (Dokumen)	12	0,000,000	
5.5	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Keuangan dan Tahun DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO (Laporan)	1	10.000,000	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Keuangan dan Tahun DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO (Laporan)	1	10.000,000	
5.6	Pengawasan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Tahun Laporan Keuangan dan Tahun Laporan Keuangan (Dokumen)	1	10.000,000	Pengawasan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Tahun Laporan Keuangan dan Tahun Laporan Keuangan (Dokumen)	1	10.000,000	
5.7	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Keuangan dan Tahun DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO (Laporan)	12	20.000,000	Kelembagaan dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO	Provinsi Banten	Jumlah Laporan Keuangan dan Tahun DPO dan Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Tahun DPO (Laporan)	12	20.000,000	
5.8	Penyusunan Laporan dan Matriks Program dan Indikator Kinerja Utama	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Laporan dan Matriks Program dan Indikator Kinerja Utama (Laporan)	1	0,000,000	Penyusunan Laporan dan Matriks Program dan Indikator Kinerja Utama	Provinsi Banten	Jumlah Dokumen Laporan dan Matriks Program dan Indikator Kinerja Utama (Laporan)	1	0,000,000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2025					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kebudayaan Berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah		Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,0	75.000.000	Kebudayaan Berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah		Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,0	75.000.000	
2.1	Penyusunan dan pelaksanaan kebudayaan berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dukungan Rencana Kebudayaan Berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah	2	25.000.000	Penyusunan dan pelaksanaan kebudayaan berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Dukungan Rencana Kebudayaan Berbasis MK Daerah pada Perangkat Daerah	2	25.000.000	
2.2	Pengembangan budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Pengembangan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	1	30.000.000	Pengembangan budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Pengembangan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	1	30.000.000	
2.3	Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	Prancis Barat	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	1	20.000.000	Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	Prancis Barat	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengawasan, dan Pengendalian Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	1	20.000.000	
2.4	Promosi dan Penyelenggaraan Laporan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Laporan Promosi dan Penyelenggaraan Laporan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	1	1.000.000	Promosi dan Penyelenggaraan Laporan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Serang	Jumlah Laporan Promosi dan Penyelenggaraan Laporan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	1	1.000.000	
2.5	Pembinaan budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pembinaan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	5	0	Pembinaan budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pembinaan Budaya MK Daerah pada Perangkat Daerah	5	0	
4	Kebudayaan Masyarakat Berbasis Perangkat Daerah		Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan masyarakat berbasis Perangkat Daerah (%)	100,0	65.000.000	Kebudayaan Masyarakat Berbasis Perangkat Daerah		Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan masyarakat berbasis Perangkat Daerah (%)	100,0	65.000.000	
4.1	Pengadaan Fasilitas Desa Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Fasilitas Budaya Desa Berbasis Kebudayaan Masyarakat	2	0	Pengadaan Fasilitas Desa Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Fasilitas Budaya Desa Berbasis Kebudayaan Masyarakat	2	0	
4.2	Pertanian dan Pengolahan Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Pertanian dan Pengolahan Kebudayaan Masyarakat	1	0.000.000	Pertanian dan Pengolahan Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Pertanian dan Pengolahan Kebudayaan Masyarakat	1	0.000.000	
4.3	Kerajinan dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Hasil Kerajinan dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	1	0.000.000	Kerajinan dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Hasil Kerajinan dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	1	0.000.000	
4.4	Keberagaman Budaya dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Keberagaman Budaya dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	2	0.000.000	Keberagaman Budaya dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Keberagaman Budaya dan Pelestarian Kebudayaan Masyarakat	2	0.000.000	
4.5	Pengembangan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Fasilitas Kebudayaan Masyarakat yang Mengikuti Penelitian dan Pelestarian	20	0.000.000	Pengembangan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Fasilitas Kebudayaan Masyarakat yang Mengikuti Penelitian dan Pelestarian	20	0.000.000	
4.6	Kelembagaan Kebudayaan Masyarakat		Jumlah Orang yang Mengikuti Kelembagaan Kebudayaan Masyarakat	50	0.000.000	Kelembagaan Kebudayaan Masyarakat		Jumlah Orang yang Mengikuti Kelembagaan Kebudayaan Masyarakat	50	0.000.000	
5	Kebudayaan Urban Berbasis Perangkat Daerah		Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan urban berbasis Perangkat Daerah (%)	100,0	600.000.000	Kebudayaan Urban Berbasis Perangkat Daerah		Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan urban berbasis Perangkat Daerah (%)	100,0	600.000.000	
5.1	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	15.000.000	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	15.000.000	
5.2	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	100.000.000	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	100.000.000	
5.3	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	30.000.000	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	30.000.000	
5.4	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	24.000.000	Penyediaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat yang Didukung Pemerintah	1	24.000.000	
5.6	Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Laporan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	1	0.000.000	Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Laporan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	1	0.000.000	
5.8	Penyenggaraan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	1	20.000.000	Penyenggaraan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	1	20.000.000	
5.7	Pembinaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Dukungan Pembinaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	1	20.000.000	Pembinaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	Kota Serang	Jumlah Dukungan Pembinaan Fasilitas Budaya Berbasis Kebudayaan Masyarakat	1	20.000.000	
5.8	Dukungan Pelaksanaan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	1	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	Prancis Barat	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Fasilitas Kebudayaan Masyarakat	1	50.000.000	

NO.	RANCANGAN BIJAK RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2026					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah		Pembelian, maintenance, perbaikan, Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah (%)	100,0	70.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah		Pembelian, maintenance, perbaikan, Pengadaan Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah (%)	100,0	70.000,00	
6.1	Pengadaan kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan	Kab. Serang	Jumlah Unit kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan yang Diokupasi (Unit)	1	400.000,00	Pengadaan kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan	Kab. Serang	Jumlah Unit kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan yang Diokupasi (Unit)	1	400.000,00	
6.2	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Serang	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Diokupasi (Unit)	1	25.000,00	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Serang	Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Diokupasi (Unit)	1	25.000,00	
6.3	Pengadaan Motor	Kab. Serang	Jumlah Paket Motor yang Diokupasi (Paket)	1	20.000,00	Pengadaan Motor	Kab. Serang	Jumlah Paket Motor yang Diokupasi (Paket)	1	20.000,00	
6.4	Pengadaan Persewaan dan Motor Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Persewaan dan Motor Lainnya yang Diokupasi (Unit)	8	100.000,00	Pengadaan Persewaan dan Motor Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Persewaan dan Motor Lainnya yang Diokupasi (Unit)	8	100.000,00	
6.5	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi (Unit)	1	100.000,00	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi (Unit)	1	100.000,00	
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi (Unit)	1	60.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi (Unit)	1	60.000,00	
6.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi (Unit)	1	60.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi (Unit)	1	60.000,00	
7	Pembelian Jasa Persewaan Usaha Persewaan Daerah		Pembelian, maintenance, perbaikan, Jasa Persewaan Usaha Persewaan Daerah (%)	100,0	1.600.000,00	Pembelian Jasa Persewaan Usaha Persewaan Daerah		Pembelian, maintenance, perbaikan, Jasa Persewaan Usaha Persewaan Daerah (%)	100,0	1.600.000,00	
7.1	Pembelian jasa sewa Metyond	Kab. Serang	Jumlah Laporan Pembelian jasa sewa Metyond (Laporan)	12	8.000,00	Pembelian jasa sewa Metyond	Kab. Serang	Jumlah Laporan Pembelian jasa sewa Metyond (Laporan)	12	8.000,00	
7.2	Pembelian jasa komunikasi, Sewa Diskor dan Lain	Kab. Serang	Jumlah Laporan Pembelian jasa komunikasi, Sewa Diskor dan Lain yang Diokupasi (Laporan)	12	800.000,00	Pembelian jasa komunikasi, Sewa Diskor dan Lain	Kab. Serang	Jumlah Laporan Pembelian jasa komunikasi, Sewa Diskor dan Lain yang Diokupasi (Laporan)	12	800.000,00	
7.3	Pembelian jasa Pembelian (jasa hotel)	Kab. Serang	Jumlah Laporan Pembelian jasa Pembelian (jasa hotel) yang Diokupasi (Laporan)	12	1.600.000,00	Pembelian jasa Pembelian (jasa hotel)	Kab. Serang	Jumlah Laporan Pembelian jasa Pembelian (jasa hotel) yang Diokupasi (Laporan)	12	1.600.000,00	
8	Pembelian Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah		Pembelian, maintenance, perbaikan, Pembelian, Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah (%)	100,0	70.700,00	Pembelian Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah		Pembelian, maintenance, perbaikan, Pembelian, Barang Milik Daerah Persewaan Usaha Persewaan Daerah (%)	100,0	70.700,00	
8.1	Pembelian jasa Persewaan, sewa Persewaan dan Paket kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan	Kab. Serang	Jumlah kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan yang Diokupasi dan Diokupasi Paketnya (Unit)	8	100.000,00	Pembelian jasa Persewaan, sewa Persewaan dan Paket kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan	Kab. Serang	Jumlah kendaraan Persewaan Dinas dan kendaraan Dinas jabatan yang Diokupasi dan Diokupasi Paketnya (Unit)	8	100.000,00	
8.2	Pembelian jasa Persewaan, sewa Persewaan, Paket dan Paket kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Serang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Diokupasi dan Diokupasi Paket dan Paketnya (Unit)	20	277.700,00	Pembelian jasa Persewaan, sewa Persewaan, Paket dan Paket kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Serang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Diokupasi dan Diokupasi Paket dan Paketnya (Unit)	20	277.700,00	
8.3	Pembelian Persewaan dan Motor Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Persewaan dan Motor Lainnya yang Diokupasi (Unit)	100	100.000,00	Pembelian Persewaan dan Motor Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Persewaan dan Motor Lainnya yang Diokupasi (Unit)	100	100.000,00	
8.4	Pembelian/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi/Diperbaiki (Unit)	1	60.000,00	Pembelian/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi/Diperbaiki (Unit)	1	60.000,00	
8.5	Pembelian/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi/Diperbaiki (Unit)	1	100.000,00	Pembelian/Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi/Diperbaiki (Unit)	1	100.000,00	
8.6	Pembelian/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi/Diperbaiki (Unit)	1	100.000,00	Pembelian/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Serang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembangu Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diokupasi/Diperbaiki (Unit)	1	100.000,00	

NO.	RANCANGAN ABAL RHPD TAHUN 2026					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2026					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	PEMBELAJAH KOPER KEDELOLOAN		Prosesnya ketercapaian Pelayanan informasi dan Pengembangan Agribisnis Desa/Desa Air Tanah (%)	85,81	1.741.000.000	PEMBELAJAH KOPER KEDELOLOAN		Prosesnya ketercapaian Pelayanan informasi dan Pengembangan Agribisnis Desa/Desa Air Tanah (%)	85,81	1.741.000.000	Belang Belajar dan Air Tanah
B	Peningkatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Proses		Prosesnya ketercapaian kegiatan Peningkatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Proses (%)	100	1.991.000.000	Peningkatan Zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Proses		Prosesnya ketercapaian kegiatan Peningkatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Proses (%)	100	1.991.000.000	
B.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provisi Banteh	Jumlah Dokumen Tersedia Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Proses (Dokumen)	3	1.001.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provisi Banteh	Jumlah Dokumen Tersedia Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Proses (Dokumen)	3	1.001.000.000	
B.2	Pembuatan dan Peningkatan Zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provisi Banteh	Jumlah Zona konservasi Air Tanah yang Didukung dalam Daerah Proses	1	100.000.000	Pembuatan dan Peningkatan Zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Provisi Banteh	Jumlah Zona konservasi Air Tanah yang Didukung dalam Daerah Proses	1	100.000.000	
B.3	Peningkatan Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses		Perentase ketercapaian kegiatan Penanaman Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses (%)	100	690.000.000	Peningkatan Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses		Perentase ketercapaian kegiatan Penanaman Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses (%)	100	690.000.000	
B.3.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses yang Tersampaikan (Dokumen)	Kab. Labak, Kab. Pangkepang, Kab. Jenang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses yang Tersampaikan (Dokumen)	27	200.000.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Penanaman Air Tanah	Kab. Labak, Kab. Pangkepang, Kab. Jenang	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses yang Tersampaikan (Dokumen)	27	200.000.000	
B.3.2	Pengembangan, Perencanaan dan Penanaman Nilai Penanaman Air Tanah	Belalang, Kab. Labak	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan, Perencanaan dan Penanaman Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses (Laporan)	1	100.000.000	Pengembangan, Perencanaan dan Penanaman Nilai Penanaman Air Tanah	Belalang, Kab. Labak	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan, Perencanaan dan Penanaman Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses (Laporan)	1	100.000.000	
B.3.3	Pengembangan dan Peningkatan Penanaman Air Tanah	Kab. Labak, Kab. Pangkepang, Kab. Jenang	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses (Laporan)	4	290.000.000	Pengembangan dan Peningkatan Penanaman Air Tanah	Kab. Labak, Kab. Pangkepang, Kab. Jenang	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Peningkatan Nilai Penanaman Air Tanah dalam Daerah Proses (Laporan)	4	290.000.000	
C	Program PEMBELAJAH MINERAL DAN BATUBARA		Prosesnya ketercapaian Pelayanan informasi dan Pengembangan Mineral dan Batubara (%)	100,00	602.148.000	Program PEMBELAJAH MINERAL DAN BATUBARA		Prosesnya ketercapaian Pelayanan Informasi dan Pengembangan Mineral dan Batubara (%)	100,00	602.148.000	Belang Mineral dan Batubara
C.1	Peningkatan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M		Perentase ketercapaian kegiatan Peningkatan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M (%)	100	602.148.000	Peningkatan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M		Perentase ketercapaian kegiatan Peningkatan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M (%)	100	602.148.000	
C.1.1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M yang Tersampaikan dan Tersedia (Dokumen)	Provisi Banteh	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam, Mineral Baku Logam jenis Tembaga dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M yang Tersampaikan dan Tersedia (Dokumen)	1	602.148.000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M	Provisi Banteh	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam, Mineral Baku Logam jenis Tembaga dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M yang Tersampaikan dan Tersedia (Dokumen)	1	602.148.000	
C.1.2	Pembuatan dan Peningkatan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M	Provisi Banteh	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam, Mineral Baku Logam jenis Tembaga dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M yang Tersampaikan dan Tersedia (Dokumen)	3	0	Pembuatan dan Peningkatan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M	Provisi Banteh	Jumlah Dokumen Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam, Mineral Baku Logam jenis Tembaga dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M yang Tersampaikan dan Tersedia (Dokumen)	3	0	
C.1.3	Pengembangan dan Peningkatan Perencanaan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M	Provisi Banteh	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam, Mineral Baku Logam jenis Tembaga dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M (Laporan)	3	0	Pengembangan dan Peningkatan Perencanaan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M	Provisi Banteh	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Perencanaan Perencanaan Wilayah dan Usaha Perambangan Mineral Baku Logam, Mineral Baku Logam jenis Tembaga dan Batubara dalam 1 (satu) Daerah Proses dan Wilayah Laut seluas dengan 12 M (Laporan)	3	0	

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 (RENSTRA PD 2021-2026 periode Tahun 2026)					HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2026					CATATAN PENTING
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Spesifik	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program PENWILAHIRAN DESA TERPADU		Capaian kemandirian ekonomi petani dan pelayanan pemadatan lapangan energi baru terbarukan (%)	100,00	4.380.000,00	Program PENWILAHIRAN DESA TERPADU		Capaian kemandirian ekonomi petani dan pelayanan pemadatan lapangan energi baru terbarukan (%)	100,00	4.380.000,00	Salah Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
14	Pengawasan pelayanan Desa dan Desa Binaan		Pemantauan kemandirian kegiatan Pengawasan pelayanan Desa dan Desa Binaan dengan alokasi provinsi (%)	100	400.000,000	Pengawasan pelayanan Desa dan Desa Binaan		Pemantauan kemandirian kegiatan Pengawasan pelayanan Desa dan Desa Binaan dengan alokasi provinsi (%)	100	400.000,000	
14.1	Penyusunan dan Penyaluran Dana Pokok Desa	Provinsi Bantul	Jumlah dokumen dan piutang desa (Dokumen)	2	400.000,000	Penyusunan dan Penyaluran Dana Pokok Desa	Provinsi Bantul	Jumlah dokumen dan piutang desa (Dokumen)	2	400.000,000	
14.2	Pengelolaan akses energi baru terbarukan berupa alat rumah listrik, alat dan komponen alat rumah listrik dan perbaikan alat rumah listrik dan alat listrik lainnya		Pemantauan kemandirian kegiatan Pengelolaan akses energi baru terbarukan berupa alat rumah listrik, alat dan komponen alat rumah listrik dan perbaikan alat rumah listrik dan alat listrik lainnya dengan alokasi provinsi (%)	100	1.750.000,000	Pengelolaan akses energi baru terbarukan berupa alat rumah listrik, alat dan komponen alat rumah listrik dan perbaikan alat rumah listrik dan alat listrik lainnya		Pemantauan kemandirian kegiatan Pengelolaan akses energi baru terbarukan berupa alat rumah listrik, alat dan komponen alat rumah listrik dan perbaikan alat rumah listrik dan alat listrik lainnya dengan alokasi provinsi (%)	100	1.750.000,000	
15.1	Pembinaan dan pengawasan akses EET (kapasitas lapangan, pemeliharaan dan lain)	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pemantauan pemeliharaan dan pengawasan akses EET (kapasitas lapangan, pemeliharaan dan lain) (Laporan)	1	50.000,000	Pembinaan dan pengawasan akses EET (kapasitas lapangan, pemeliharaan dan lain)	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pemantauan pemeliharaan dan pengawasan akses EET (kapasitas lapangan, pemeliharaan dan lain) (Laporan)	1	50.000,000	
15.2	Pelaksanaan kegiatan pemadatan akses EET	Provinsi Bantul	Jumlah test kegiatan pemadatan akses EET (JMB)	4	1.000.000,000	Pelaksanaan kegiatan pemadatan akses EET	Provinsi Bantul	Jumlah test kegiatan pemadatan akses EET (JMB)	4	1.000.000,000	
15.3	Penyusunan dan penjabatan fas. petani akses EET di Bantul	Provinsi Bantul	Jumlah dokumen dan piutang akses EET di Bantul (Dokumen)	4	200.000,000	Penyusunan dan penjabatan fas. petani akses EET di Bantul	Provinsi Bantul	Jumlah dokumen dan piutang akses EET di Bantul (Dokumen)	4	200.000,000	
15.4	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Kemandirian Energi yang dilakukan oleh pemangku kewilayahan di tingkat Desa/Provinsi		Pemantauan kemandirian kegiatan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Kemandirian Energi yang dilakukan oleh pemangku kewilayahan di tingkat Desa/Provinsi	100	200.000,000	Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Kemandirian Energi yang dilakukan oleh pemangku kewilayahan di tingkat Desa/Provinsi		Pemantauan kemandirian kegiatan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Kemandirian Energi yang dilakukan oleh pemangku kewilayahan di tingkat Desa/Provinsi	100	200.000,000	
16.1	Strategi teknis konservasi energi kepada petani/UKM/Desa/Provinsi dan Kabupaten	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan strategi teknis konservasi energi kepada petani/UKM/Desa/Provinsi dan Kabupaten (Laporan)	1	50.000,000	Strategi teknis konservasi energi kepada petani/UKM/Desa/Provinsi dan Kabupaten	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan strategi teknis konservasi energi kepada petani/UKM/Desa/Provinsi dan Kabupaten (Laporan)	1	50.000,000	
16.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada petani/Desa/Provinsi dan Kabupaten	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada petani/Desa/Provinsi dan Kabupaten (Laporan)	1	50.000,000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada petani/Desa/Provinsi dan Kabupaten	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada petani/Desa/Provinsi dan Kabupaten (Laporan)	1	50.000,000	
16.3	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (Laporan)	1	50.000,000	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (Laporan)	1	50.000,000	
16.4	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat desa/Provinsi dan Kabupaten	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat desa/Provinsi dan Kabupaten (Laporan)	1	50.000,000	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat desa/Provinsi dan Kabupaten	Provinsi Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat desa/Provinsi dan Kabupaten (Laporan)	1	50.000,000	

Berdasarkan pada Tabel. 2.18, dikarenakan komposisi target dan pagu anggaran indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 telah dikoordinasikan sebelumnya oleh BAPPEDA Provinsi Banten sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, maka perbedaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dengan usulan unit kerja di perangkat daerah hanya ada pada usulan kegiatan dan sub kegiatannya saja, sedangkan pagu indikatifnya adalah sama terkait kesepakatan dalam proses verifikasi, sebagaimana terlihat pada tabel 2.19 dibawah ini.

Tabel 2.19 Analisis Review Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2025

NO.	URAIAN RINGKASAN	MANDATORY (RENSTRA DESDM 2023-2026)	USULAN UNIT KERJA (Hasil Forum Perangkat Daerah)	ANALIS PERBEDAAN
A.	Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran : 3 - Indikator Kinerja Sasaran : 4 - Program : 5 - Indikator Kinerja Program : 6 - Kegiatan : 16 - Sub Kegiatan : 21 	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran : 3 - Indikator Kinerja Sasaran : 4 - Program : 5 - Indikator Kinerja Program : 6 - Kegiatan : 17 - Sub Kegiatan : 23 	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran : 0 - Indikator Kinerja Sasaran : 0 - Program : 0 - Indikator Kinerja Program : 0 - Kegiatan : 1 - Sub Kegiatan : 2
B.	Kebutuhan Anggaran			
	1 Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	: Rp. 4.350.000.000 8,06%	: Rp. 4.350.000.000 8,06%	: Rp. 0 0,00%
	2 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	: Rp. 19.050.000.000 35,32%	: Rp. 19.050.000.000 35,32%	: Rp. 0 0,00%
	3 Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	: Rp. 1.741.005.931 3,23%	: Rp. 1.741.005.931 3,23%	: Rp. 0 0,00%
	4 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	: Rp. 603.149.577 1,12%	: Rp. 603.149.577 1,12%	: Rp. 0 0,00%
	5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	: Rp. 28.193.400.000 52,27%	: Rp. 28.193.400.000 52,27%	: Rp. 0 0,00%
	<i>a. Gaji, Tunjangan & TPP-ASN</i>	: Rp. 23.120.144.000 42,86%	: Rp. 23.120.144.000 42,86%	: Rp. 0 0,00%
	<i>b. Kegiatan Penunjang Urusan Kantor DESDM</i>	: Rp. 5.073.256.000 9,41%	: Rp. 5.073.256.000 9,41%	: Rp. 0 0,00%
	JUMLAH	: Rp. 53.937.555.508 100,00%	: Rp. 53.937.555.508 100,00%	: Rp. 0 0,00%

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebagai wujud proses perencanaan partisipasi, maka dalam proses penyusunannya, dokumen RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 telah dilakukan penyerapan aspirasi dengan menerima usulan langsung dari masyarakat melalui surat permohonan dan menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 dengan melibatkan partisipasi aktif DPRD Provinsi Banten, instansi teknis terkait Pusat, instansi terkait 8 (delapan) wilayah Kabupaten/Kota, instansi teknis terkait Provinsi, serta pelaku pembangunan lainnya (*stakeholders*).

Ringkasan hasil review dan analisis dari penyerapan aspirasi masyarakat dan usulan Kabupaten/Kota untuk rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026, sebagaimana terlihat pada tabel 2.20 dibawah ini :

Tabel 2.20 Usulan rencana kerja dari para pemangku kepentingan Tahun 2026

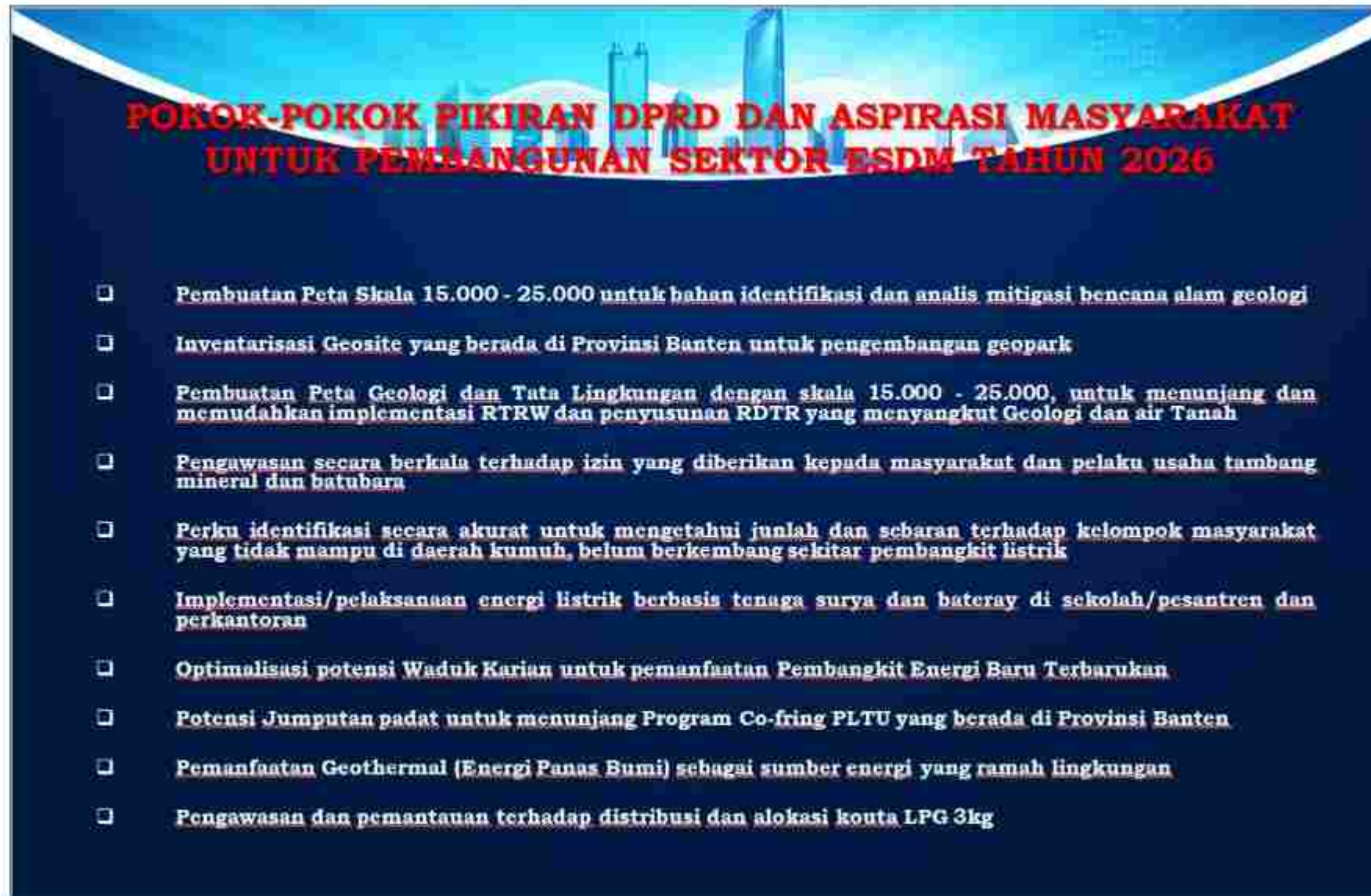
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Forum PD
1.	Program : PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Kab. Lebak Kab. Pandeglang	1. Pembangunan infrastruktur EBT di kawasan GUK dan DESWITA	1 paket	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2026 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 1.000.000.000
			2. Perencanaan Teknis Infrastruktur EBT <ul style="list-style-type: none"> o Inventarisasi potensi sumber EBT di kawasan GUK o Perencanaan Teknis sumber EBT Air Terjun/Curug di kawasan GUK o Perencanaan Teknis sumber EBT Air Terjun/Curug di kawasan DESWITA o Penyediaan dokumen database potensi EBT di Kabupaten Lebak sebagai peluang investasi daerah dan penguatan perwujudan program swasembada energi di mana salah satunya ditetapkan untuk Kabupaten Lebak dengan keberadaan potensi air, angin, panas bumi, surya, dsb. 	4 lokasi	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2026 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 500.000.000
			3. Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada perangkat daerah di Kabupaten Lebak agar dapat memaksimalkan potensi EBT di Kabupaten Lebak	2 kegiatan	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2026 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 100.000.000
2.	Program : PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Kab. Lebak Kab. Pandeglang	1. Pemetaan, penelitian, dan pengembangan sumber data geologi di kawasan Geopark Ujung Kulon	1 paket	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2026 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 200.000.000

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Forum PD
			2. Penyusunan kajian potensi kawasan lindung geologi berupa Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) untuk wilayah geosite Granodiorit Cihara yang bernilai Internasional dan geosite Batuan Metamorf Cihara yang bernilai Nasional guna meminimalisir dampak alih fungsi lahan dan upaya konservasi secara maksimal	1 lokasi	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2026 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 200.000.000
			3. Penelitian tentang zona depresi Citorek sebagai bagian dari proses pembentukan Bayah Dome yang menjadi tema pengembangan Geopark Nasional Bayah Dome dan penguat narasi hubungkait antara keberadaan TNGHS dan masyarakat adat Wewengkon Citorek dengan geosite Gunung Luhur saat ini	1 lokasi	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 200.000.000
			4. Penelitian tentang karakteristik kegeologian di Saba Budaya Baduy dan sekitarnya sebagai penguat narasi hubungkait antara bio, culture, dan geosite sehingga menjadi cerita utuh dalam bingkai jalur geowisata Baduy Eco-Culture di kawasan Geopark Nasional Bayah Dome	1 lokasi	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 200.000.000
			5. Pemetaan potensi geosite fosil kayu sempur untuk dilakukan konservasi in situ dan dikembangkan menjadi taman fosil purba sebagai wisata edukasi kegeologian	1 dokumen	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 100.000.000
			6. Pemetaan potensi ex-tambang emas Antam pada geosite kompleks mineralisasi cirotan untuk dilakukan konservasi dan dikembangkan menjadi biorama museum tambang emas sebagai wisata edukasi kegeologian	1 dokumen	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 100.000.000

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan Forum PD
			7. Penyediaan data geologi di geosite Gunung Luluh untuk ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana geologi khususnya kerawanan bencana tanah longsor pada dinding/tepi jalan Provinsi (Cipanas-Ciparay)	1 dokumen	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 100.000.000
			8. Penyediaan data geologi pada geosite sepanjang pesisir selatan Kabupaten Lebak untuk ditetapkan menjadi kawasan rawan bencana geologi khususnya kerawanan bencana tsunami.	1 dokumen	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 100.000.000
3.	Program : PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Kab. Lebak Kab. Pandeglang	9. Pemetaan, penelitian, dan pengembangan potensi mineral TUFF di kawasan Geopark Ujung Kulon	1 dokumen	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 100.000.000
			10. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap eksplorasi batuan fosil kayu sempur di Kab. Lebak untuk diekspor yang mana batuan tersebut sudah ditetapkan sebagai geosite	1 laporan	Diusulkan dalam Rancangan RENJA DESDM 2025 dalam kegiatan dan sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 dengan asumsi kebutuhan anggaran Rp. 100.000.000

Selain usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada tabel 2.20 diatas, telah tersampaikan pula 10 (sepuluh) usulan program dan kegiatan masyarakat melalui DPRD Provinsi Banten melalui Pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2025, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.13, yaitu :

Gambar 2.13 Pokok Pikiran DPRD untuk RENJA 2026 DESDM



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR ESDM TAHUN 2026

- Pembuatan Peta Skala 15.000 - 25.000 untuk bahan identifikasi dan analisis mitigasi bencana alam geologi
- Inventarisasi Geosite yang berada di Provinsi Banten untuk pengembangan geopark
- Pembuatan Peta Geologi dan Tata Lingkungan dengan skala 15.000 - 25.000, untuk menunjang dan memudahkan implementasi RTRW dan penyusunan RDTR yang menyangkut Geologi dan air Tanah
- Pengawasan secara berkala terhadap izin yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha tambang mineral dan batubara
- Perku identifikasi secara akurat untuk mengetahui jumlah dan sebaran terhadap kelompok masyarakat yang tidak mampu di daerah kumuh, belum berkembang sekitar pembangkit listrik
- Implementasi/pelaksanaan energi listrik berbasis tenaga surya dan baterai di sekolah/pesantren dan perkantoran
- Optimalisasi potensi Waduk Karian untuk pemanfaatan Pembangkit Energi Baru Terbarukan
- Potensi Jemputan padat untuk menunjang Program Co-firing PLTU yang berada di Provinsi Banten
- Pemanfaatan Geothermal (Energi Panas Bumi) sebagai sumber energi yang ramah lingkungan
- Pengawasan dan pemantauan terhadap distribusi dan alokasi kouta LPG 3kg

Selain pokok-pokok pikiran yang disampaikan pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 sebagaimana tersebut diatas, terdapat pula pokok-pokok pikiran dari DPRD Provinsi Banten yang disampaikan melalui aplikasi SIPD-RI dalam proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam aplikasi SIPD-RI tersebut, tersampaikan 2 point pokok-pokok pikiran dari DPRD Provinsi Banten yang ditunjukkan untuk Dinas ESDM Provinsi Banten, yang substansi isinya adalah usulan pembangunan infrastruktur EBT, sebagaimana terlihat pada tabel .

Tabel 2.21 Pokok Pikiran DPRD Provinsi Banten di SIPD-RI untuk RENJA Tahun 2026

Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nilai (Rp.) Hasil Verifikasi	Alokasi Pada APBD	Keterangan
Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	2.454.231.000	2.454.231.000	Revitalisasi PLTS Terpusat 50 kWp di Pulau Tunda Kabupaten Serang
	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	500.000.000	500.000.000	Pembangunan PLTS Atap On Grid 25 kWp di SMK 3 Kota Tangerang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memperhatikan tema pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen Rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2026, yaitu *“Implementasi pembangunan kolaboratif yang inklusif sebagai perwujudan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”*, serta rumusan program/kegiatan perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang disampaikan pada Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RENJA Dinas ESDM Tahun 2026, maka ditetapkan tema pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Banten tahun 2026, yaitu : **“Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan Pengusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral melalui implementasi pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk memujudkan Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”**.



Untuk mengimplementasikan tema pembangunan dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 tersebut, serta dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu strategis terkini, telah ditetapkan 6 prioritas pembangunan yang termaktub dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2026, yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, dan Tangguh;
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif;
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana;

RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten dengan mengusung tema pembangunan sebagaimana tersebut diatas, difokuskan pada penanganan Prioritas Pembangunan Daerah yang terdapat dalam dokumen Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026, terutama untuk Prioritas Pembangunan yang strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu Prioritas Pembangunan No. 4 dan 5, sebagaimana diuraikan pada Tabel terkait Rancangan Program Prioritas RKPD Tahun 2026 di hal IV-52 s.d IV-88.

Tabel 3.1 Prioritas pembangunan Sektor ESDM dalam RKPD Provinsi Banten Tahun 2025

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026
4.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Penyediaan energi dan peningkatan pemanfaatan listrik bagi masyarakat melalui perluasan akses, kapasitas, dan jangkauan pelayanan infrastruktur energi (gas dan listrik), pengembangan prioritas energi terbarukan, serta penerapan upaya dekarbonisasi energi untuk mendukung ketahanan energi daerah dan nasional
5.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Diversifikasi sumber energi, peningkatan ketahanan energi melalui riset, inovasi dan eksplorasi potensi dan cadangan energi, serta penguatan literasi publik dalam pemanfaatan energi secara efisien dan berkelanjutan

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS ESDM PROVINSI BANTEN

Telah dirumuskan Tujuan dan Sasaran dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026 dengan berpedoman pada Rancangan Akhir Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten dan Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025-2029 serta mengacu pula pada prioritas pembangunan yang ada dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2026.

Rumusan Tujuan dan Sasaran dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA DESDM Tahun 2026

NO.	TUJUAN (DAERAH DAN PERANGKAT)	SASARAN (DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH)	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN (DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH)	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1.	Merwujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas (T4)		Indeks Williamson (Satuan : Indeks)	0,747
			Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/Kapita)	2.395,00
	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan.	Meningkatnya Layanan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (S1)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (Nilai)	3,2
			Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi (Persen)
2.	Merwujudkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Dan Berketahanan (T5).		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Nilai)	67,17
			Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (Persen)
	Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon Yang Berkelanjutan (B3)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Persen)	46,05	
	1. Meningkatkan Pengelolaan Energi Terbarukan.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (%)	5,57	
	2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi.	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (%)	1,48	
	3. Meningkatkan Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Geologi (%)	49,6	
	Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi (%)	25,07	

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Merujuk pada dokumen Rancangan RKPD Provinsi Banten tahun 2026, telah dirancang program-program prioritas pembangunan yang dirumpunkan dan diselaraskan kedalam 5 Prioritas Pembangunan serta urusan dan kewenangan yang dimiliki Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten akan berfokus pada penanganan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, yaitu Prioritas Pembangunan No. 4 dan 5.

Implementasi penanganan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah terkait, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yaitu Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan RKPD Tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1.317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada tabel 3.3 diuraikan program pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2025 beserta target sasarannya, yaitu :

Tabel 3.3 Program Prioritas RENJA DESDM Tahun 2026 pada Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025
4.	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah	Rasio Elektrifikasi (Satuan : %)	100,00	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Ketercukupan Daya Listrik (Satuan : %)	94,20
5.	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Meningkatnya Pengelolaan Energi Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (Satuan : %)	5,57	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT (Satuan : Mega Watt)	98,13
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (%) (Satuan : %)	1,48		Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2) (Satuan : %)	1,18
		Meningkatnya Pengelolaan Geologi Tata Lingkungan	Persentase Pelayanan Kegeologian (Satuan : %)	49,6	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola (Satuan : %)	41,47
						Persentase Air Tanah yang dikelola (Satuan : %)	46,34

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025
		Meningkatnya Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi	Persentase Tata kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kewenangan Provinsi sumber daya mineral (Satuan : %)	25,07	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (Unit Usaha Pertambangan) (Satuan : %)	83,20
3.	Non Prioritas (Penunjang Urusan Perangkat Daerah)	-	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Satuan : Indeks)	80

Program pembangunan prioritas tahun 2026 beserta sasaran-sasaran yang diembannya sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.4, dilaksanakan secara operasional melalui kegiatan-kegiatan pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Perencanaan indikasi kegiatan dimaksud didasarkan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dalam tahapan penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 diatur lebih lanjut pagu penganggarannya oleh **Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lampiran Pagu Indikatif per Perangkat Daerah pada Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2026**. Terdapat 18 kegiatan dan 63 sub kegiatan pembangunan dalam Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 hasil verifikasi yang tersebar di 5 unit Esselon III di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.

Rumusan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026, sesuai SE dimaksud diatas dan berdasarkan atas hasil verifikasi dengan Tim Verifikasi yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Banten, disajikan pada tabel 3.4 sebagai berikut, yaitu :

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			49.770.667.292,00				55.732.633.000,00	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			49.770.667.292,00				55.732.633.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			49.770.667.292,00				55.732.633.000,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			27.591.904.022,00				29.201.939.400,00	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	80 Indeks	27.591.904.022,00				29.201.939.400,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKR Perangkat Daerah	60,1 Nilai	386.143.070,00				460.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	37.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	12.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	12.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Serang, Curug, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	28.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Laporan	80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	135.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13 Laporan	132.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0008	Peaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperikat Logkup Perangkat Daerah	1 Data	28.143.070,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Data	145.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0009	Peaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdesakan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdesakan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	30.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Berita Acara	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase laporan keuangan perangkat daerah yang diaudit sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	100 Persen	24.114.168.652,00				21.581.438.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	23.859.168.652,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	100 Orang/Bulan	21.088.809.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	400.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	456.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Perbaikan/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	17.050.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	33.880.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	9.900.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	6.950.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	20.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18 Laporan	46.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	6.900.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perentase Barang Milik Daerah yang terbit pencatatan dan fisik	100 Persen	50.000.000,00				50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Perentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal SAM	100 Persen	90.000.000,00				310.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaran Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawainan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawainan	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.900.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0006	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berfasilitas Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berfasilitas Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	50.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Orang	100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 Orang	30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelesaian kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	100 Persean	371.818.300,00				635.300.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Korpri dan Instalasi	Jumlah Paket Korpri dan Instalasi yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	42.615.300,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	25.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0006	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	100 Persen	353.391.000,00				1.700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	150.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	24.860.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	183.351.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Unit	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0008	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0015	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	225.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	800.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.29.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	100 Persen	1.321.000.000,00				2.650.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	2.400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	100 Persen	1.043.642.000,00				1.815.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	225.590.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Unit	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan	43 Unit	570.320.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43 Unit	550.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.09.0005		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	130.756.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	137 Unit	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	175.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.01.1.09.0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	62.502.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGIAN			522.800.000,00				414.023.000,00	
		[Terketolanya geodiversity dan kebencanaan geologi]	Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola	41,47 Persen	522.800.000,00				414.023.000,00	
3.29.02.1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	100 Persen	406.020.000,00				345.023.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02.1.01.0001		Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	5 Dokumen	411.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	276.023.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02.1.01.0002		Penerbitan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	44.520.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	69.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		[Terketolanya air tanah]	Persentase Air Tanah yang dikelola	46,34 Persen	618.000.000,00				414.023.000,00	
3.29.02.1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100 Persen	66.705.000,00				69.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.02.1.03.0002		Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	23 Laporan	66.700.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23 Laporan	69.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PERDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			431.600.000,00				264.589.000,00	
		[Terkelolanya Usaha Pertambangan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi]	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (unit)	30 Unit	431.600.000,00				264.589.000,00	
	3.29.03.1.01	Pendataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	100 Persen	139.589.000,00				139.589.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	2 Laporan	139.589.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	139.589.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sesuai ketentuan	100 Persen	200.000.000,00				75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	20 Dokumen	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Dokumen	15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	189.300.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3.29.03.1.04	Penetapan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batu bara dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Penetapan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batu bara dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100 Persen	85.200.000,00				80.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat								
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	85.200.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			3.434.250.000,00				4.166.763.000,00	
		[Tersedianya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan]	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT	98,13	3.434.250.000,00				4.166.763.000,00	-
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Persentase ketersediaan data Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	100 Persen	10.000,00				500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa								
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	1 Dokumen	10.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan tegangan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase tata kelola Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan tegangan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi yang dikelola	100 Persen	3.240.740.000,00				3.416.763.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah								
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	100.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT								
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang direvitalisasi	1 Unit	2.590.954.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT								
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit	600.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 unit	2.941.763.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan penuliskan data potensi aneka EBT di daerah								
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	57.596.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		[Terkendalinya tingkat emisi karbon (CO2)]	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)	1,18	3.758.231.000,00				4.166.763.000,00	-
	3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membina/urusi energi dan sumber daya mineral	Persentase Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membina/urusi energi dan sumber daya mineral	100 Persen	185.500.000,00				250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi								
			Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	5 Unit	185.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG (URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN)	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU BENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			8.793.821.000,00				21.400.319.000,00	
		[Tercukupinya Daya Listrik Daerah]	Rasio ketercukupan daya listrik	94,2	8.793.821.000,00				21.400.319.000,00	
	3.29.06.1.01	Penetapannya izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Perentase kuantitas dan kualitas Penetapannya izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 Persen	254.250.000,00				700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Peryaratan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Peryaratan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	3 Dokumen	54.250.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	85 Dokumen	25.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85 Dokumen	200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	2 Laporan	175.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Atendimento listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan (Rumah Tenaga Seaman)	3000 RTS	8.939.571.000,00				20.790.319.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Pemerta Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen	500.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	1.140.319.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Laporan	238.700.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	2 Laporan	635.123.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3000 Unit	7.185.748.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3000 Unit	16.700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			J U M L A H		40.774.435.022,00				56.537.633.000,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

1. Program pembangunan prioritas tahun 2026 beserta sasaran-sasaran yang diembannya sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.3 di Bab III, dilaksanakan secara operasional melalui kegiatan pembangunan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Perencanaan indikasi kegiatan dimaksud didasarkan atas Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit kerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
2. Dalam tahapan penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 diatur lebih lanjut pagu penganggarnya oleh Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lampiran Pagu Indikatif per Perangkat Daerah pada Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2026.
3. Berdasarkan Surat Edaran tersebut di point 2, telah disusun Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 yang didalamnya terdiri dari 5 program dan 18 kegiatan yang tersebar di 5 unit kerja Esselon III di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Dari 18 kegiatan tersebut, terdapat 63 sub kegiatan yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja sub kegiatan (*output*).
4. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan pemutakhiran terakhirnya,

yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1.317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5. Rencana pendanaan untuk Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 40.774.435.022,-** yang dialokasikan untuk mendanai 5 program, 18 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Rencana pendanaan tersebut sesuai dengan nilai alokasi pendanaan Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran 2 tentang Pagu Indikatif Perangkat Daerah pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026.
6. Bila diperbandingkan dengan tahapan penyusunan RENJA DESDM Tahun 2026 sebelumnya (Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir, maka pagu indikatif Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA DESDM Tahun 2026 adalah lebih kecil dibandingkan ketiganya, sebagaimana perbandingan berikut :
 - a. Rancangan Awal : Rp. 53.937.555.508
 - b. Rancangan : Rp. 53.937.555.508
 - c. Rancangan Akhir : Rp. 49.770.667.292
 - d. Penyempurnaan Rancangan Akhir : Rp. 40.774.435.022

Berdasarkan data pagu indikatif per tahapan RENJA DESDM Tahun 2026 tersebut diatas, pagu indikatif mengalami penurunan 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp. 4.166.888.216,- pada tahapan Rancangan Akhir dan Rp. 8.996.232.270,- pada tahapan Penyempurnaan Rancangan Akhir, sehingga total penurunan pagu indikatifnya adalah sebesar Rp. 13.163.120.486,- dibandingkan dengan tahapan Rancangan Awal dan Rancangan (Forum PD dan Musrenbangda) yang merupakan kebutuhan rencana kerja perangkat daerah pada tahun 2026.

7. Selain adanya pengurangan anggaran sebagaimana tersebut pada point 6, terdapat pula perubahan komposisi jumlah kegiatan dan sub kegiatan dan perubahan komposisi alokasi anggarannya yang dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil verifikasi Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026 dan kebijakan pimpinan dalam pembahasan internal penyusunan komposisi pagu indikatif Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026.

Lebih lengkapnya perubahan komposisi dari rekapitulasi Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026 dibandingkan dengan komposisi sebelumnya pada tahapan Rancangan Awal/Rancangan dan Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten adalah sebagaimana terinci pada tabel 4.1

8. Dan pada tabel 4.2 digambarkan Rumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas ESDM Tahun 2026 sesuai formulasi 5 program, 18 kegiatan dan 63 sub kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, lengkap disajikan sesuai dengan ketentuan naskah RENJA Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Tabel 4.1 Perbedaan Rumusan Ranwal/Rancangan, Rancangan Akhir dan Rancangan Akhir Rekapitulasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan dari RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rancangan Awal dan Rancangan RKPd 2026		Rancangan Akhir RKPd 2026		Selisih (Ranhir terhadap Ranwal/Rancangan)		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPd 2026		Selisih (Penyempurnaan Ranhir terhadap Ranhir)	
		Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 3	8 = 6 - 4	9	10	11 = 9 - 5	12 = 10 - 6
3.29.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46	29.434.585.000	43	27.698.862.292	-3	-737.532.708	43	27.591.964.022	0	-186.668.278
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	500.000.000	9	500.000.000	0	0	9	388.143.070	0	-211.856.930
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	23.575.144.000	5	23.594.992.970	0	9.348.970	0	24.114.169.852	0	529.176.862
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0
3.29.01.1.05	Administrasi Kesehatan Perangkat Daerah	6	145.000.000	5	96.000.000	-1	-55.000.000	5	96.000.000	0	0
3.29.01.1.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	319.000.000	8	371.618.300	0	187.261.700	8	371.618.300	0	0
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	6	928.551.000	4	503.551.000	-2	-425.000.000	4	353.361.000	0	-150.190.000
3.29.01.1.06	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	2	1.800.000.000	2	1.800.000.000	0	-100.000.000	2	1.283.000.000	0	-517.000.000
3.29.01.1.09	Pembelian Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	6	797.893.000	6	797.893.000	0	0	6	1.243.642.000	0	245.752.000
3.29.02	PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	3	400.688.000	3	618.800.000	0	218.112.000	3	522.800.000	0	-98.000.000
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	2	333.908.000	2	552.920.000	0	218.112.000	2	456.920.000	0	-96.000.000
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Persebaran Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	66.780.000	1	66.780.000	0	0	1	66.780.000	0	0
3.29.03	PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	3	278.584.000	4	470.584.000	-1	-200.000.000	4	431.600.000	0	-38.984.000
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut dangkal dengan 12 Ml	1	65.584.000	1	105.000.000	0	19.416.000	1	135.800.000	0	30.200.000
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Ml Laut	0	0	2	325.000.000	2	325.000.000	2	200.500.000	0	-124.400.000
3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	2	185.000.000	1	-40.584.000	-1	-144.416.000	1	66.200.000	0	-54.616.000
3.29.05	PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	5	4.832.567.000	4	3.758.231.000	-1	-274.336.000	6	3.434.250.000	2	-321.981.000
3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1	400.000.000	0	0	-1	-400.000.000	1	10.000	1	10.000
3.29.05.1.07	Pengelolaan aspek energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan tekanan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	3	3.432.567.000	3	3.508.231.000	0	75.674.000	4	3.248.740.000	1	-259.491.000
3.29.05.1.06	Penelitian Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikaitkan oleh perangkat daerah yang menbidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1	200.000.000	1	250.000.000	0	50.000.000	1	185.500.000	0	-64.500.000
3.29.06	PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	7	29.756.144.000	7	17.225.000.000	0	-3.573.144.000	7	8.703.821.000	0	-8.431.179.000
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Pengubah Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	3	500.000.000	3	325.000.000	0	-225.000.000	3	254.250.000	0	-70.750.000
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Swam Berstandar, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4	29.248.144.000	4	16.900.000.000	0	-3.248.144.000	4	8.539.571.000	0	-8.360.429.000
	Jumlah	64	63.937.558.000	61	49.770.667.292	-3	-4.166.890.708	63	40.774.435.023	2	-8.996.232.270

Tabel 4.2 Rumusan Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana dan Pendanaan dari RENJA Dinas ESDM Provinsi Banten Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Deta Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Pemanggungjawab	Lokasi	
						Target	Page (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Daerah		Maksimum Listrik Perkapita (kWh/Kapita)	2.204,400	2.205,00	8.793.021.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
				Rasio Elektrifikasi (%)	99,99	100,00	8.793.021.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
			2.29.06	PEMANGGILAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio ketercukupan daya listrik (%)	94,00	94,20	8.793.021.000		
			2.29.06.1.01	Pembinaan dan Pengujian Tenaga Listrik Non Badan Usaha dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase kualitas dan kualitas Pembinaan dan Pengujian Tenaga Listrik Non Badan Usaha IRII Negara dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (%)	100,00	100,00	254.290.500		
			2.29.06.1.01.0001	Pertemuan Prosedur dan Penyediaan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha IRII Negara dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Penyediaan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha IRII Negara dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan (Dokumen)	6	5	54.250.000		5 wilayah Kabupaten/Kota
			2.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Izin/izin (isi) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha IRII Negara dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Izin/izin (isi) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha IRII Negara dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Dokumen)	78	88	26.000.000		5 wilayah Kabupaten/Kota
			2.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha IRII Negara dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha IRII Negara dan Pengujian Tenaga Listrik serta Penyediaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3	2	170.000.000		5 wilayah Kabupaten/Kota
			2.29.06.1.06	Penggerakan untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pemberdayaan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang mendapat manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	11.907	3.000	8.020.071.000		
			2.29.06.1.06.0001	Penggerakan dan Pengiriman Data dan Informasi Penemuan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penemuan Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Dokumen)	6	6	500.000.000		5 wilayah Kabupaten/Kota
			2.29.06.1.06.0003	Penggerakan dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Penggerakan dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu (Laporan)	6	4	208.700.000		5 wilayah Kabupaten/Kota
			2.29.06.1.06.0005	Kombinasi dan Sinergisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Laporan Hasil Kombinasi dan Sinergisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan (Laporan)	6	2	626.123.000		5 wilayah Kabupaten/Kota
			2.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun hasil Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan (Unit)	8.500	3.000	7.186.740.000		5 wilayah Kabupaten/Kota
			2.	Terwujudnya ketahanan energi dan pengelolaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan	Meningkatnya Pemanfaatan Energi Terbarukan		Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	NA	26,78	4.308.000.000
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Kewenangan Provinsi (%)	5,03				6,16	3.246.750.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.29.06	PEMANGGILAN ENERGI TERBARUKAN	Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT				75,48	90,43	3.246.750.000		
2.29.06.1.03	Penggerakan penyediaan Sarana Sarana Boga dan energi alternatif	Persentase pemanfaatan dan sinergisasi sarana boga dan energi alternatif (%)				100,00	8,00	15.000		
2.29.06.1.03.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan sarana	Jumlah rencana kegiatan penyediaan sarana (Dokumen)				3	1	10.000		Provinsi Banten
2.29.06.1.07	Penggerakan aneka energi baru terbarukan berupa energi surya, angin, air, dan geotermal, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya	Persentase laba usaha Aneka Energi Baru Terbarukan berupa energi surya, angin, air, dan geotermal, serta pemanfaatan sumber daya alam lainnya (%)				100,00	100,00	3.246.740.000		
2.29.06.1.07.0002	Pemilihan dan pengawasan aneka EBT kapasitas terpasang, investasi di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pemilihan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah (Laporan)				1	1	150.000		Provinsi Banten
2.29.06.1.07.0005	Rekrutmen inspektur aneka EBT	Jumlah inspektur aneka EBT yang direkrut (Unit)				NA	1	2.000.000.000		Kabupaten Serang
2.29.06.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (Unit)				1	1	600.000.000		Kota Tangerang
2.29.06.1.07.0010	Penyusunan dan pemantauan data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah (Dokumen)				6	1	87.590.000		Provinsi Banten

No.	Tupai	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Bencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokal
						Target	Papir (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Menururnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (%)	N/A	1,48	185.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			PENGLOLAAN ENERGI TERBAIK	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)	0,82	1,18	185.500.000		
			3.29.01.1.00 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral (%)	N/A	100,00	185.500.000		
			3.29.01.1.00.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi (Unit)	N/A	0	185.500.000		Provinsi Banten
		Meningkatnya Pengolahan Geologi Tata Lingkungan		Persentase Pelayanan Kegeologian (%)	29,96	49,00	522.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			PENGLOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola (%)	28,87	41,47	522.800.000		
			3.29.02.1.01 Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Air Tanah yang dikelola (%)	33,33	46,34			
			3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan (%)	100,00	100,00	458.020.000		
			3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	151	E	411.500.000		Provinsi Banten
			3.29.02.1.01.0003 Penetapan Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0	1	44.520.000		Provinsi Banten
			3.29.02.1.03 Penghapusan Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Penghapusan Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (%)	100,00	100,00	66.780.000		
			3.29.02.1.03.0002 Penghapusan, Peninjauan dan Penetapan Hasil Penelitian Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghapusan, Peninjauan dan Penetapan Hasil Penelitian Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1	23	66.780.000		
		Meningkatnya Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kawasan Provinsi		Persentase Tata Kelola Pertambangan Mineral dan Batubara Kawasan Provinsi (%)	6,36	25,87	431.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
			PENGLOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (sisi Usaha Pertambangan)	10	30,00	431.600.000		
			3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila	Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila yang ditetapkan (%)	100,00	100,00	155.800.000		
			3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila	Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jina termalis, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila	N/A	2	150.800.000		Kab. Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon
			3.29.03.1.03 Penemuan dan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila Laut	Persentase Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila Laut sesuai ketentuan (%)	100,00	100,00	200.400.000		
			3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila Laut	N/A	20	15.300.000		Kab. Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon
			3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mila Laut	N/A	1	185.500.000		Kab. Lebak, Pandeglang, Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon

No.	Tupai	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			3.29.03.1.04	Penatausahaan dan Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Sulfida, Mineral Bukan Logam, dan Batuain dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Penatausahaan dan Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Sulfida, Mineral Bukan Logam, dan Batuain dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (%)	100,00	100,00	95.200.000		
			3.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengeloaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengeloaan Wilayah Pertambangan Rakyat	0	1	95.200.000		Kab. Lubuk, Pandeglang, Serang, Kota Serang dan Kota Cagayn
			3.29.03.1.04.0011	Pemberian Rekomendasi Teknik dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Rekomendasi Teknik dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	0	0	0		
2.	-	-						27.591.964.022	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
								27.591.964.022		
			3.29.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	47,63	80,00	27.591.964.022		
			3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai ANP Perangkat Daerah	75,95	90,1	268.143.370		
			3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	37.500.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	1	12.500.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	1	12.500.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	1	7.500.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	1	7.500.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	12	10	28.500.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	10	135.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0008	Penyusunan Pengumpulan Data Statistik Sekretariat Daerah	Jumlah Data Statistik Sekretariat Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Dipaparkan Laporan Perangkat Daerah	0	1	20.143.070		Provinsi Banten
			3.29.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	1	20.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)	100,00	100,00	34.114.169.552		
			3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78	100	23.858.169.552		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	400.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	5.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	5.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	10.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Sistem Penggajian Pemerintah	Jumlah Dokumen Sistem Penggajian Pemerintah dan Tidak Lajut Pemerintah	1	1	10.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	10	20.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	5.000.000		Provinsi Banten

No.	Tugas	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Teta Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Rencana Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terbit pencatatan dan fisk.	100,00	100,00	50.000.000		
			3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	1	50.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SIP minimal BAK	100,00	100,00	98.000.000		
			3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	1	15.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	0		Provinsi Banten
			3.29.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	5.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Pembekalan Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pembekalan Kinerja Pegawai	2	2	5.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	50.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	80	15.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan prosedur	100,00	100,00	371.818.300		
			3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	15.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	155.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	43.818.300		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Sarung Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Sarung Cetak dan Penggantian yang Disediakan	1	1	24.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06.0006	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	18.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06.0009	Penyempurnaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyempurnaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	70.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Atribut Dinas pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Atribut Dinas pada SKPD	1	1	25.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.06.0011	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	30.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan standar	100,00	100,00	383.391.000		
			3.29.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	0		Provinsi Banten
			3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	100.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	24.890.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	12	100.551.500		Provinsi Banten
			3.29.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	0	0		Provinsi Banten
			3.29.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	225.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan pelayanan penunjang sesuai standar	100,00	100,00	1.281.000.000		
			3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	181.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.100.000.000		Provinsi Banten

No.	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Rencana Tahun 2025		Unit Kerja/Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Pagu (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	100,00	100,00	1.043.642.000		
			3.29.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6	225.990.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	14	570.520.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124	137	130.750.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2	1	15.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4	1	50.000.000		Provinsi Banten
			3.29.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	0	1	50.992.000		Provinsi Banten
Jumlah							40.774.435.022		

BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

- A. Dokumen ini merupakan hasil dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2026 yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan tahapan penyusunan Penyempurnaan Rancangan Akhir yang substansinya mengacu dan sesuai dengan Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2026.
- B. Selanjutnya untuk penetapan pagu indikatif perangkat daerah, dokumen ini juga dilandasi oleh Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2025 Tanggal 30 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 di Lampiran Pagu Indikatif per Perangkat Daerah pada Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Banten Tahun 2026.
- C. Berdasarkan uraian di point A dan B diatas, telah disusun Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 yang didalamnya terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang masing-masing memiliki indikator dan target kinerja yang harus dicapai dan tersebar di 5 unit kerja Esselon III di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Rencana pendanaan yang dialokasikan untuk Rancangan Akhir RENJA Dinas ESDM Tahun 2026 tersebut adalah sebesar **Rp. 40.774.435.022,-**.
- D. Bila diperbandingkan dengan tahapan penyusunan RENJA DESDM Tahun 2026 sebelumnya (Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir, maka pagu indikatif Penyempurnaan Rancangan Akhir RENJA DESDM Tahun 2026 adalah lebih kecil dibandingkan ketiganya, sebagaimana perbandingan berikut :
- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Rancangan Awal | : Rp. 53.937.555.508 |
| 2. Rancangan | : Rp. 53.937.555.508 |
| 3. Rancangan Akhir | : Rp. 49.770.667.292 |
| 4. Penyempurnaan Rancangan Akhir | : Rp. 40.774.435.022 |

- E. Berdasarkan data pagu indikatif per tahapan RENJA DESDM Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada point D, pagu indikatif mengalami penurunan 2 (dua) kali, yaitu sebesar Rp. 4.166.888.216,- pada tahapan Rancangan Akhir dan Rp. 8.996.232.270,- pada tahapan Penyempurnaan Rancangan Akhir, sehingga total penurunan pagu indikatifnya adalah sebesar Rp. 13.163.120.486,- dibandingkan dengan tahapan Rancangan Awal dan Rancangan (Forum PD dan Musrenbangda) yang merupakan kebutuhan rencana kerja perangkat daerah pada tahun 2026.
- F. Untuk melaksanakan RENJA Perangkat Daerah ini agar diperhatikan 4 (empat) prinsip utama, yaitu :
1. Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif memiliki kekhususan (*specific*), terukur (*measurable*), ketercapaian (*achievable*), ketersediaan sumber daya (*resources availability*), dan waktu (*time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat.
 2. Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan Rencanakan (*plan*), kerjakan apa yang direncanakan (*do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*check*), dan aksi tindak lanjut.
 3. Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
 - a. Taat dan sesuai aturan
 - b. Sesuai dengan norma profesionalisme
 - c. Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*)
 4. Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*money follow program selected policy*)

**LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BANTEN TAHUN 2026**





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Raya Syekh Nawawi Al Bantani Curug-PalimaTelp. (0254)267109 Fax. (0254)267110 Serang
Website: desdm.bantenprov.go.id Email : desdm@bantenprov.go.id Kode Pos : 42171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. 155 – DESDM/2026

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN,

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk terbentuknya tim sebagaimana dimaksud pada hurup "a" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004; Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5585);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
30. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
32. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026;
2. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 sesuai RENSTRA-SKP;
3. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 dari hasil Forum Perangkat Daerah;
5. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 Berdasarkan Surat Edaran yang ditetapkan;
6. Menyusun Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan RKPD;
7. Menyusun Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026 sesuai dengan sistematika penulisan, tahapan, dan tata cara termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;

KETIGA

: Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten bertanggungjawab secara administrasi maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 5 Februari 2025



PIH. KEPALA,

ART JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT

NIP. 19771230 200212 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Gubernur Banten
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Nomor : 902/Kep. 155 - DESDM/2025

Tanggal : 3 Februari 2025

Tentang : Penetapan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten Tahun 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Ari James Faraddy, ST. M.Si. MT NIP. 19771230 200212 1 008	Plt. Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	AHMAD HERI SUDRAJAT, ST, M.Si NIP. 19750220 200604 1 005	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda	Ketua
3.	Yiyi Bochari, S.Sos, M.Si NIP. 19710924 200112 1 003	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Deri Dariawan, S.T, M.MT NIP. 19780311 200112 1 002	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Anggota
5.	Dedi Hidayat, ST, MA NIP. 19760422 200112 1 001	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Anggota
6.	Ii Mahfudin, ST. NIP. 19811025 201001 1 002	Plt. Kabid Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Anggota
7.	Hilman Saptajji, ST, M.MT NIP. 19720926 200604 1 004	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
8.	Nia Juniawati, S.Si., MM NIP. 19760602 200604 2 016	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
9.	Juheriyah, S.Sos NIP. 19820110 200212 2 002	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat
10.	Andri Zainal Arifin NIP. 19760609 201410 1 001	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 3 Februari 2025



Plt. KEPALA,

ARI JAMES FARADDY, ST. M.Si. MT

NIP. 19771230 200212 1 008

**LAMPIRAN II : SURAT EDARAN PLH SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026**





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Banten
(Terlampir)
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Banten
(Terlampir)

SURAT EDARAN NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG PENYEMPURNAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Bahwa berdasarkan pasal 102 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026, serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/4209/Bangda tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Banten Tahun 2026 tanggal 18 Juli 2025, maka hasil fasilitasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD Perangkat Daerah TA 2026 serta mempedomani Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Kepala Perangkat Daerah melakukan penyesuaian Penyempurnaan Renja Tahun 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan terhadap hasil input rincian Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti yang tercantum dalam Lembar Penelitian, guna menjamin konsistensi dan ketepatan substansi perencanaan;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang secara langsung mendukung Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen Penyempurnaan RKPD Tahun 2026, dengan memperhatikan proporsi belanja pokok minimal 80% dan penunjang maksimal 20%;
3. Memastikan penganggaran belanja pegawai mencakup seluruh komponen pembayaran selama 14 (empat belas) bulan, antara lain Gaji dan Tunjangan PNS, TPPNS, Tambahan Penghasilan Guru, Gaji dan Tunjangan serta BPO KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Gaji PPPK, sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan riil;

4. Memastikan penganggaran belanja hibah uang dan bansos sudah berbasis hasil verifikasi;
5. Menyusun Penyempurnaan Renja Tahun 2026 sesuai pagu indikatif yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran, dengan memastikan keselarasan antara program dan anggaran saat penginputan di SIPD;
6. Dalam proses input Penyempurnaan Renja Tahun 2026, apabila terdapat kode rekening belanja yang tidak tersedia pada SIPD, Perangkat Daerah agar segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk penyesuaian atau penelusuran lebih lanjut dan BPKAD memfasilitasi kode rekening belanja yang belum tersedia pada SIPD sesuai dengan kebutuhan belanja Perangkat Daerah;
7. Untuk keperluan input data dalam aplikasi SIPD:
 - a. Admin BAPPEDA selaku TAPD Perencanaan melakukan Pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Pembiayaan, penambahan sub kegiatan baru, pembukaan akses sub kegiatan dan penginputan pagu indikatif;
 - b. Admin BPKAD selaku TAPD Keuangan melakukan buka akses rincian anggaran;
 - c. Admin BAPPEDA selaku TAPD Perencanaan dan Admin BPKAD selaku TAPD Keuangan dapat membuka akses Admin Daerah (Sekretaris Daerah) dan melakukan pengaturan sistem yang diperlukan.
8. Melaksanakan penginputan dan verifikasi Penyempurnaan Renja Tahun 2026 sesuai jadwal sebagai berikut :
 - a. Menyampaikan rekapitulasi pagu program, kegiatan, dan sub kegiatan kepada Kepala Bappeda Provinsi Banten c.q. Bidang Mitra, sebagai dasar pembukaan akses input Renja pada aplikasi SIPD;
 - b. Input rincian Penyempurnaan Renja melalui aplikasi SIPD-RI (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id>) dilakukan mulai tanggal 30 Juli s.d. 4 Agustus 2025;
 - c. Verifikasi Renja dan Perbaikan Hasil Verifikasi Renja Perangkat Daerah tanggal 31 Juli s.d. 4 Agustus 2025.
9. Dokumen Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai bahan penetapan Peraturan Gubernur tentang Renja Perangkat Daerah, disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Banten c.q. Bidang PDSIP paling lambat tanggal 4 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB.

Demikian Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 30 Juli 2025

Sekretaris Daerah



Deden Apriandhi

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan).

DAFTAR LAMPIRAN

A. DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten;
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
18. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
19. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
20. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten;
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;
22. Inspektur Provinsi Banten;
23. Sekretaris DPRD Provinsi Banten;
24. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
25. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten;
26. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten;
27. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten;
28. Kepala Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten;
29. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten;
30. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten;
31. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
32. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten;
33. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten;
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten;
36. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten;
37. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
38. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
39. Kepala Badan Penghubung Provinsi Banten.

**PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
PADA PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RKPD
PROVINSI BANTEN TAHUN 2026**

Perangkat Daerah : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	URAIAN	PAGU INDIKATIF	KETERANGAN
1.	PAGU RANCANGAN AKHIR RKPD 2026	49.770.667.292	
2.	PAGU PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RKPD 2026	40.774.435.022	
	Belanja Pegawai	23.129.992.970	
	Belanja Kegiatan Prioritas dan Pendukung	17.644.442.052	
3.	BERTAMBAH/ BERKURANG	(8.996.232.270)	

LAMPIRAN III : RUMUSAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AKHIR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN (APLIKASI SIPD.GO.ID BESERTA RUMUSANNYA)



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						40.774.435.022,00							55.537.633.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						40.774.435.022,00							55.537.633.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						40.774.435.022,00							55.537.633.000,00	
1.	3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah</i>	-			80 Indeks	27.591.964.022,00						-	29.201.939.000,00	
		[Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	73,00 90	47,63	50,00 74	55,00 80	27.591.964.022,00	-	-	-	-	-	-	29.201.939.000,00	-
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai AKIP Perangkat Daerah</i>	-			80,1 Nilai	288.143.070,00						-	460.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	37.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		12.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		12.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Serang, Curug, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		7.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	7.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		7.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				16 Laporan	29.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				13 Laporan	135.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		132.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>				1 Data	26.143.070,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		145.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Berita Acara	20.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		32.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)</i>	-			100 Persen	24.114.169.652,00			-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	-	21.581.439.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/Bulan	23.659.169.652,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		21.005.009.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	400.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		456.750.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		17.050.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		33.880.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		9.900.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		6.050.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	20.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berdasarkan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		46.200.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berdasarkan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		6.600.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tertib pencatatan dan fisik</i>	-			100 Persen	50.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berdasarkan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK</i>	-			100 Persen	90.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	-	310.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	50.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		100.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				80 Orang	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		30.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal</i>	-			100 Persen	371.618.300,00			-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	-	635.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	155.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	42.618.300,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		35.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	24.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		25.500.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berdasarkan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		10.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berdasarkan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berdasarkan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		25.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		40.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar</i>	-			100 Persen	353.391.000,00			-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	-	1.700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	150.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				1 Paket	24.690.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				12 Unit	103.551.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	225.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal</i>	-			100 Persen	1.281.000.000,00			-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	-	2.650.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	181.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		250.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		2.400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik</i>	-			100 Persen	1.043.642.000,00			-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten	-	1.815.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	225.990.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				43 Unit	570.920.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		550.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				137 Unit	130.750.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	15.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		300.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis berlandask an iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegrita s	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		175.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	50.982.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan masyarakat bermoral Pancasila dan demokratis bertandaskan iman dan taqwa melalui reformasi birokrasi yang adaptif dan berintegritas	ASN Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten		190.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	<i>Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola Persentase Air Tanah yang dikelola</i>	-			41,47 Persen 46,34 Persen	522.800.000,00						-	414.023.000,00	
		[Terkelolanya geodiversity dan kebencanaan geologi]	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola	100 100,00 649700	0 211700 28,87	284700 35,17 40,94 51,22	357700 41,47 46,72 58,54	522.800.000,00	-	-	-	-	-	-	414.023.000,00	-
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan</i>	-			100 Persen	456.020.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resilien Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan Pelaku Usaha Pengguna Air Tanah	-	345.023.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				5 Dokumen	411.500.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudka n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan Pelaku Usaha Pegguna Air Tanah		276.023.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			<i>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi</i>				1 Dokumen	44.520.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudka n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan Pelaku Usaha Pegguna Air Tanah		69.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		[Terkelolanya air tanah]	Persentase Air Tanah yang dikelola	100	0 33,33	38,21 51,22	46,34 58,54	522.800.000,00	-	-	-	-	-	-	414.023.000,00	-
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	<i>Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang tersedia</i>	-			100 Persen	66.780.000,00			Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudka n Pembang unan Berke lanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku Usaha Pegguna Air Tanah pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	-	69.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>				23 Laporan	66.780.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku Usaha Pengguna Air Tanah pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		69.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	<i>Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi</i>	-			30 Unit	431.600.000,00						-	264.589.000,00	
		-	-	-	-	-	-	431.600.000,00	-	-	-	-	-	-	264.589.000,00	-
	3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	<i>Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan</i>	-			100 Persen	135.800.000,00			-	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelgiang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon	-	139.589.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.01.0006	Pengumpulan dan Pengolahan	Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut													
			<i>Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut</i>				2 Laporan	135.800.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelgiang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon		139.589.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Terkelolanya Usaha Pertambangan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi]	Jumlah Rekomendasi terhadap Usulan IPR Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (Unit Usaha Pertambangan) Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah Persentase Usaha Pertambangan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi (Unit Usaha Pertambangan)	100 12097100 27 4 70	0 10 2 22 9,71 97100	0 1000 10097100 20 23	0 22 30	431.800.000,00	-	-	-	-	-	-	264.589.000,00	-
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	<i>Persentase Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sesuai ketentuan</i>	-			100 Persen	200.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelglang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon	-	75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				20 Dokumen	15.300.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelglang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon		15.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Pertambangan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut.</i>				1 Laporan	185.300.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelglang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon		60.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	<i>Persentase Penatausahaan izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	-			100 Persen	95.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelglang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon	-	50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat														
			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat</i>				1 Dokumen	95.200.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pelaku usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara di Kab. Pandelglang, Kab. Lebak, Kab. Serang dan Kota Cilegon		50.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
4.	3.28.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2) Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT</i>	-			1,18 Persen 98,13 MW	3.434.250.000,00						-	4.166.763.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Tersedianya pembangkit tenaga listrik yang berbasis Aneka Energi Baru Terbarukan]	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT Kapasitas Pemanfaatan Aneka EBT Porsi EBT dalam Bauran Energi	10 143.42 164 6.92	0 3.03 75.48	10 114 5.53 5.61 86.80	124 150 5.53 5.57 98.13	3.434.250.000,00	-	-	-	-	-	-	4.166.763.000,00	-
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	<i>Persentase ketersediaan data Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi</i>	-			100 Persen	10.000,00			-	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa														
			<i>Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa</i>				1 Dokumen	10.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		500.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	<i>Persentase tata kelola Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi yang dikelola</i>	-			100 Persen	3.248.740.000,00			-	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	3.416.763.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah</i>				1 Laporan	150.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		75.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terrevitalisasi</i>				1 Unit	2.590.994.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT														
			<i>Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT</i>				1 unit	600.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		2.941.763.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah														
			<i>Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah</i>				1 Dokumen	57.596.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik dan Resiliensi Terhadap Bencana	Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Pelaku Usaha		400.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
		[Terkendalinya tingkat emisi karbon (CO2)]	Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)	2.16	0 0.82	0 0.91	1.18	3.434.250.000,00	-	-	-	-	-	-	4.166.763.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	<i>Persentase kuantitas dan kualitas Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>	-			100 Persen	254.250.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan	-	700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan</i>				3 Dokumen	54.250.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan		150.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>				85 Dokumen	25.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan		200.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Perjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</i>				2 Laporan	175.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Pelaku Usaha Ketenagalistrikan		350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	<i>Jumlah kemandirian listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan (Rumah Tangga Sasaran Perdesaan)</i>	-			3000 RTS	8.539.571.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Rumah Tangga belum Mandiri Listrik	-	20.790.319.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														
			<i>Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				4 Dokumen	500.000.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Rumah Tangga belum Mandiri Listrik		1.140.319.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu</i>				4 Laporan	238.700.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Rumah Tangga belum Mandiri Listrik		350.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.06.1.06.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				2 Laporan	635.123.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas	Rumah Tangga belum Mandiri Listrik		600.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3.28.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
			<i>Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>				3000 Unit	7.165.748.000,00	Kota Serang, Curug, Sukajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial	Rumah Tangga belum Mandiri Listrik		18.700.000.000,00	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			JUMLAH					40.774.435.022,00							55.537.633.000,00	

Matrik Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026

OPD : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir RKPD 2026		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026		Bertambah/Berkurang (Rp.)	Keterangan (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.25.01	PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	65 Nilai	27.898.052.292	80 Indeks	27.881.964.022	-166.888.270	Rubah KKL	Berkurang (Efisiensi Biaya Modal, Jasa Konsultansi, Pembayaran Listrik dan Advertorial)
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai ANOP Perangkat Daerah	88 Nilai	500.000.000	88,1 Nilai	288.143.070	-211.856.930	Rubah KKL	Sekurang (Efisiensi Jasa Konsultansi)
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	27.906.000	-42.104.000	Rubah Rincian	Efisiensi Tenaga Ahli
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	0	Rubah Rincian	
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.500.000	1 Dokumen	12.500.000	0	Rubah Rincian	
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	0	Rubah Rincian	
3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	0	Rubah Rincian	
3.25.01.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD)	18 Laporan	80.000.000	18 Laporan	29.300.000	-29.300.000	Rubah Rincian	Efisiensi Nerasumber
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	132.500.000	13 Laporan	131.000.000	-2.500.000	Rubah Rincian	Penyesuaian Tarif Tenaga Ahli
3.25.01.1.01.0008	Realisasi Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Dipaparkan Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	145.500.000	1 Data	26.143.070	-149.356.930	Rubah Rincian	Perubahan Biaya Jasa Konsultansi
3.25.01.1.01.0009	Realisasi Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	32.000.000	1 Berita Acara	20.000.000	-42.000.000	Rubah Rincian	Efisiensi Nerasumber
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang diinput sesuai SAP (Standar akuntansi pemerintahan)	100 %	21.584.992.976	100 %	24.114.188.652	2.529.195.676		Bertambah (Gaji dan Tunjangan ASN)
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan	23.129.892.976	188 Orang/ Bulan	23.993.185.652	863.292.676	Rubah Rincian	Perencanaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	400.000.000	0	Rubah Rincian	
3.25.01.1.02.0003	Realisasi Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penelaahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	0	Rubah Rincian	
3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	5.000.000	0	Rubah Rincian	


Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir RKPD 2026		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026		Bertambah/Berkurang (Rp.)	Keterangan (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/Perjajutan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.02.0006	Pengejaian dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tridat Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	20.000.000	18 Laporan	20.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terbit pencatatan dan faktur	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	0		Tetap
3.29.01.1.03.0003	Pengetahuan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengetahuan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	80.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal SAIK	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	0		Tetap
3.29.01.1.05.0002	Penyediaan Paket Dinas Beserta Atribut Keleengkapanya	Jumlah Paket Paket Dinas Beserta Atribut Keleengkapanya	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	80.000.000	1 Orang	80.000.000	0	Rubah KKL/Rubah Rincian	
3.29.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	15.000.000	20 Orang	15.000.000	0	Rubah KKL/Rubah Rincian	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan layanan administrasi umum yang dilaksanakan sesuai standar dan jadwal	100 %	371.618.300	100 %	371.618.300	0		Tetap
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perangkoan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perangkoan Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.000.000	1 Paket	155.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	42.518.300	1 Paket	42.518.300	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	1 Paket	24.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.06.0008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.06.0010	Penatausahaan Alokasi Dinevis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Alokasi Dinevis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	0	Rubah Rincian	

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir RKPD 2026		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026		Bertambah/Berkurang (Rp.)	Keterangan (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.01.1.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor sesuai daftar kebutuhan standar	100 %	502.951.000	100 %	352.291.000	-150.660.000		Sesungguhnya (Perubahan Salanj Mada Pembangunan Kantor)
3.29.01.1.01.0002	Pengadaan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	1 Unit	151.000	151.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Fermentasi Rantai
3.29.01.1.01.0008	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	1 Paket	24.493.000	-507.000	Rubah Rincian	Efisiensi Rantai
3.29.01.1.01.0008	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	103.551.000	12 Unit	103.551.000	0	Rubah KKL/Rubah Rincian	
3.29.01.1.01.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	180.000.000	0 Unit	0	-180.000.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Perubahan Pembangunan Kantor
3.29.01.1.01.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	225.000.000	1 Unit	225.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pelayanan Penunjang Sesuai Jadwal	100 %	1.800.000.000	100 %	1.281.000.000	-519.000.000		Sesungguhnya (Efisiensi Adversarial dan Berbasis Labial)
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	171.000.000	-29.000.000	Rubah Rincian	Penyesuaian Pembayaran Listrik
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.600.000.000	12 Laporan	1.100.000.000	-500.000.000	Rubah Rincian	Efisiensi Salanj Adversarial
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dan dalam Kondisi Baik	100 %	707.890.000	100 %	1.041.642.000	333.752.000		Sesungguhnya (Penyesuaian Pemeliharaan Kandang Dinas RA dan RA)
3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kandang Perantara Dinas atau Kandang Dinas Jekater	Jumlah Kandang Perantara Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	205.490.000	8 Unit	211.893.000	6.403.000	Rubah Rincian	Penyesuaian pemeliharaan Kandang Dinas Jabatan RA
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya	44 Unit	321.880.000	43 Unit	370.520.000	48.640.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Penyesuaian Pemeliharaan Kandang Dinas Operasional RA dan RA
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	137 Unit	130.750.000	137 Unit	130.750.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	0	Rubah Rincian	
3.29.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	75.000.000	1 Unit	68.582.000	-6.418.000	Rubah Rincian	Efisiensi Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor
3.29.02	PENGLOLAAN ASPEK GEOLOGIAN	Persentase Geodiversity dan Kebencanaan Geologi yang dikelola Persentase Air Tanah yang dikelola	41,47 % 46,34 %	618.898.888	41,47 % 46,34 %	522.896.000	-96.002.888		Berkurang (Efisiensi Pembuatan Lettermark Geosite)
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	100 %	552.000.000	100 %	456.820.000	-95.180.000		Sesungguhnya (Efisiensi Pembuatan Lettermark Geosite)
3.29.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pengalihan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	507.500.000	0 Dokumen	411.500.000	-96.000.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Penyesuaian ROPDK
3.29.02.1.01.0002	Penetapan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	44.500.000	1 Dokumen	44.500.000	0	Rubah Rincian	

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir RKPD 2026		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026		Bertambah/Berkurang (Rp.)	Keterangan (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
3.29.02.1.01	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	100 %	66.738.000	100 %	66.738.000			Tercap
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	23 Laporan	66.738.000	23 Laporan	66.738.000		Rubah Rincian	
3.29.03	PENGLOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Jumlah Usaha Pertambangan yang menerapkan kaidah pertambangan yang sesuai dengan regulasi	36 Unit	479.934.000	36 Unit	431.608.000	-48.326.000		Berkurang (Efisiensi Pengaliran Dana)
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Persentase Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	100 %	188.000.000	100 %	138.800.000	-49.200.000		Berkurang (Penyesuaian Jenis Konstruksi)
3.29.03.1.01.0008	Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	1 Laporan	105.000.000	1 Laporan	121.830.000	16.830.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Perencanaan Pagu untuk Revisi Minerba/Keselahan Tagging Sub Kegiatan dan di Tagging Sub Kegiatan Baru
3.29.03.1.03	Penataanannya Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut sesuai ketentuan	100 %	225.000.000	100 %	209.400.000	-15.600.000		Berkurang (Efisiensi Pengaliran Dana)
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Penanaman dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penanaman dan Informasi Ijin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	20 Dokumen	15.000.000	20 Dokumen	11.300.000	-3.700.000	Rubah Rincian	Perencanaan Pagu Resmi
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Penyesuaian Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	310.000.000	1 Laporan	161.328.000	-148.672.000	Rubah Rincian	Efisiensi Pengaliran Dana

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir RKPD 2026		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026		Bertambah/Berkurang (Rp.)	Keterangan (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
1.29.03.1.04	Penertarikan dan Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Persentase Penertarikan dan Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	100 %	40.584.000	100 %	83.290.000	42.706.000		Semburan (Penyesuaian Perkiraan Dinas)
1.29.03.1.04.0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Dokumen	40.584.000	1 Dokumen	83.290.000	42.706.000	Rubah Rincian	Penyesuaian Perkiraan Dinas
1.29.05	PENGLOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Kapasitas Pemfaatan Aneka EBT Persentase Penurunan Tingkat Emisi Karbon (CO2)	38,13 MW 1,10 %	1.738.231.000	38,13 MW 1,10 %	1.434.250.000	-303.981.000		Berkurang (Efisiensi Belanja Jasa Konsultan)
1.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Persentase ketersediaan data Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	0 %		100 %	10.000	10.000		Semburan (Belanja ATK) (Efisiensi Belanja Jasa Konsultan)
1.29.05.1.05.0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	0 Dokumen		1 Dokumen	10.000	10.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Perencanaan ATK
1.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Persentase tata kelola Aneka Energi Baru Terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi yang dikelola	100 %	1.508.231.000	100 %	1.248.740.000	-259.491.000		Semburan (Efisiensi Belanja Jasa Konsultan)
1.29.05.1.07.0003	Perencanaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas lepasang, instalasi) di daerah	Jumlah laporan perencanaan perencanaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas lepasang, instalasi) di daerah	0 Laporan		1 Laporan	100.000	100.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Perencanaan Rapel
1.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang revitalisasi	1 Unit	1.364.231.000	1 Unit	1.148.994.000	-215.237.000	Rubah Emisi	Efisiensi Perkiraan Dinas dan penyesuaian anggaran untuk Jasa Konsultan Pengawasan
1.29.05.1.07.0007	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Unit	800.000.000	1 Unit	800.000.000		Rubah Emisi	
1.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan penulisan data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	5 Dokumen	264.000.000	1 Dokumen	87.595.000	-176.405.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Efisiensi Belanja Jasa Konsultan
1.29.05.1.08	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	100 %	280.000.000	100 %	185.800.000	-94.200.000		Semburan (Penyesuaian souvenir dan Jumlah peserta)
1.29.05.1.08.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	3 Unit	280.000.000	1 Unit	185.800.000	-94.200.000	Rubah KKL/Rubah Rincian	Penyesuaian souvenir dan Jumlah peserta
1.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio ketenagalistrikan daya listrik	94,20 %	17.225.000.000	94,20 %	1.793.821.000	-15.431.179.000		Berkurang (Pengurangan W dan BR)
1.29.06.1.01	Penertarikan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyesuaian Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase kuantitas dan kualitas Penertarikan dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyesuaian Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100 %	325.000.000	100 %	264.250.000	-60.750.000		Semburan (Penyesuaian souvenir dan Jumlah peserta)
1.29.06.1.01.0001	Penetapan Prosedur dan Penyesuaian dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyesuaian Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Penyesuaian dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyesuaian Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	3 Dokumen	125.000.000	3 Dokumen	64.250.000	-60.750.000	Rubah Rincian	Penyesuaian souvenir dan Jumlah peserta

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Rancangan Akhir RKPD 2026		Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD 2026		Berubah/Berkurang (Rp.)	Kelasifikasi (Rubah KKL/ Rubah Rincian)	Catatan
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 5	9	10
2.20.06.1.01.0001	Pengukuran, Rekomendasi, Partisipasi dan Informasi dan Kualitas Pelayanan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negera dan Perbaikan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jumlah Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Persepsi	Jumlah surat Rekomendasi Persepsi dan Informasi dan Kualitas Pelayanan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negera dan Perbaikan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jumlah Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Persepsi	81 Dokumen	25.000.000	81 Dokumen	25.000.000			
2.20.06.1.01.0002	Pengabdian dan Peningkatan Pelaksanaan Persepsi dan Kualitas Pelayanan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negera dan Perbaikan Tenaga Listrik serta Penyediaan Jumlah Kapasitas Penyediaan Tenaga Listrik dalam Daerah Persepsi	Jumlah laporan hasil Pengabdian dan Peningkatan Pelaksanaan Persepsi dan Kualitas Pelayanan Tenaga Listrik Non Badan Usaha MUK Negera	2 Laporan	115.000.000	2 Laporan	115.000.000			
2.20.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dalam Berkebang, Daerah Terpencil dan Perkotaan	Jumlah kemudahan listrik untuk masyarakat tidak mampu di wilayah yang belum terjangkau, daerah terpencil dan perkotaan (Rumah Tenaga Dasar)	7.000 RTS	11.000.000.000	3.000 RTS	3.000.000.000	-8.000.000.000	Rubah KKL	Berkurang (Penganggaran R dan DR)
2.20.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengalokasian Dana dan Internal Pemerintah Melalui dan Melalui Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Teknik Persepsi Melalui dan Melalui Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	500.000.000			
2.20.06.1.06.0002	Pengembangan dan Pengalokasian Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan hasil Pengembangan dan Pengalokasian Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	218.700.000	18.700.000		
2.20.06.1.06.0003	Kondisi dan Sistemisasi Penyediaan Tenaga Listrik dalam Berkebang, Daerah Terpencil dan Perkotaan	Jumlah Laporan Hasil Hambatan dan Sistemisasi Penyediaan Tenaga Listrik dalam Berkebang, Daerah Terpencil dan Perkotaan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	420.100.000	320.100.000		
2.20.06.1.06.0004	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik dalam Berkebang, Daerah Terpencil dan Perkotaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik dalam Berkebang, Daerah Terpencil dan Perkotaan	1.000 Unit	12.400.000.000	3.000 Unit	1.000.100.000	-8.200.000.000	Rubah KKL, Rubah Rincian	Pengalokasian Lini III dan SH
Jumlah				48.778.887.294		48.774.488.022	-4.390.399.272		Berkurang

Paraf Bidang Mitra Bappeda	Paraf
Pl Kapala Bidang Perencanaan, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Arif Kautsar Setiawan, S.T., M.T. NIP. 19770501 200701 1 614 Kelas Tim Kerja SDA	
Indah Darmawati, S.T., M.M., MT NIP. 19780808 200112 2 002	

Seorang, Juli 2025
Pl. Kepala
Divisi Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Banten


Arif James Praditya, S.T., M.Si., M.T.
NIP. 19770305 200212 1 006